



BUKU INFORMASI MUSEUM BANGUNAN-BANGUNAN INDIS



Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA

Jl. Jend. A. Yani Yogyakarta, Telp. (0274) 586934, 510996 KP. 55121

069.27

AGU

b



**BUKU INFORMASI MUSEUM
TENTANG BANGUNAN-BANGUNAN
INDIS**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA
JL. Jend. A. Yani 6 Yogyakarta. Telp (0274) 586934-510996
KP: 55121**

Penyusun : V. AGUS SULISTYA, S.Pd
Drs. GUNAWAN HAJI
SURYANTO PAMUJI

Penyunting : Drs. BUDIHARJA
Drs. SUHARJA

Ilustrasi : Drs. RUDI BAMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karuni-Nya sehingga penyusunan buku “Informasi Museum Tentang Bangunan-Bangunan Indis” dapat selesai tepat pada waktunya hingga dapat dimanfaatkan.

Buku ini berisi informasi mengenai bangunan-bangunan Indis hasil seminar IAAI tentang; Pelestarian Bangunan Indis Dalam menunjang Sektor Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan di DIY. Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Indis Dalam Perspektif Pariwisata. Seni Bangun Gaya Indis Penelitian, Pelestarian dan Pemanfaatannya. Kelestarian Dan Pelestarian Asitektur Indis. Kelestarian dan Pelestarian Bangunan Indis Di Jawa Tengah. Kelestarian Dan Pelestarian Bangunan Indis Di Kota Semarang. Hasil Seni Bangun Bergaya Indis, Studi Kasus Kelestarian Sejumlah Benteng Di Jawa Tengah. Pengkajian Dan Pemanfaatan Arkeologi Masa Kolonial. Dan yang terakhir Bangunan-Bangunan Indis Di Yogyakarta, Tinjauan Kelestarian dan Pelestarian. Bangunan Indis perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu Museum Benteng Yogyakarta menerbitkannya menjadi buku informasi museum. Sehingga dari bukti sejarah maupun material tersebut terutama mengenai informasi yang terkandung di dalamnya dapat diketahui.

Harapan kami buku ini dapat membantu para pengunjung museum, khususnya para pelajar, pemerhati museum, generasi muda, dan masyarakat pada umumnya dalam memahami arti sejarah yang terdapat dalam koleksi museum.

Kami tetap menyadari dalam menyajikan buku ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi lebih baiknya pada penyusunan-penyusunan buku mendatang.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi selesainya buku ini. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.

Yogyakarta Juni 2001

Penyusun.

**SAMBUTAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK
BENTENG VREDEBURG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya atas terbitnya buku “Informasi Museum Tentang Bangunan-Bangunan Indis” tepat pada waktunya melalui Bagian Proyek Benteng Vredeburg Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2001.

Kami berharap agar buku ini dapat dijadikan sumber informasi bagi ilmu pengetahuan sejarah pada khususnya, sehingga rasa cinta akan ilmu pengetahuan sejarah akan dapat terpujuk sejak dini kepada generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada para penulis/penyusun dan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pemimpin Bagpro Benteng Vredeburg
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dra. Amin Sukrilah
NIP. 131925747

SAMBUTAN KETUA IAAI KOMDA JATENG DIY

Pertama - tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, inayah, dan hidayahNyalah sehingga buku informasi museum yang berisi makalah mengenai bangunan-bangunan Indis ini dapat terbit dan diketahui oleh masyarakat umum.

Terima kasih kami ucapkan kepada Museum Benteng Yogyakarta yang telah memfasilitasi dan menerbitkan buku ini. Kita menyadari bahwa sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda selama beratus-ratus tahun lamanya, meninggalkan banyak peninggalan berupa bangunan-bangunan kolonial yang memiliki ciri khas dan gaya tersendiri. Bangunan-bangunan itu merupakan saksi bisu sejarah bangsa Indonesia yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Karena bagaimanapun bangunan Indis merupakan bagian dari masa lalu bangsa yang memberikan ciri dan warna dari keberadaan bangsa saat ini.

Pada kesempatan ini, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Yogyakarta dan Jawa Tengah yang merupakan organisasi profesi di bidang Arkeologi bekerja sama dengan SPSP Jawa Tengah, SPSP DIY, dan Museum Benteng Yogyakarta merasa terpanggil untuk menggali,meneliti dan mengkomunikasikan hasil penelitian bangunan Indis kepada masyarakat umum. Kegiatan Temu ilmiah yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 1997 ini memberikan gambaran mengenai bangunan Indis di Yogyakarta dan Jawa Tengah meliputi keberadaan, Perawatannya, dan peranannya di masa sekarang bagi ilmu pengetahuan, budaya dan pariwisata.

Makalah-makalah tersebut akan tiada artinya bagi masyarakat banyak apabila tidak diterbitkan. Oleh karena itu sekali lagi atas nama IAAI Saya mengucapkan banyak terima kasih atas terbitnya buku ini.

Yogyakarta, Juni 2001
Ketua

SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, sehingga buku "Informasi Museum Tentang Bangunan-Bangunan Indis" selesai tepat waktu. Kepada seluruh anggota tim kami ucapkan selamat dan terima kasih.

Perlu ditegaskan bahwa, salah satu tugas pokok dari sebuah museum adalah menyajikan koleksi-koleksinya, disamping tugas lain yaitu mengumpulkan, merawat, menyimpan, meneliti, dan menginformasikan, Penyajian tersebut bukan hanya dari materinya saja namun juga harus dibarengi dengan penyajian nilai.

Untuk menyajikan nilai tentang sebuah benda, tentu harus didahului dengan suatu penelitian/pengkajian terlebih dahulu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Buku yang berisi hasil seminar tentang bangunan-bangunan Indis ini dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Buku ini dapat menjadi media dan alat bantu untuk menambah pengetahuan, terutama mengenai bangunan Indis. Dari buku ini diharapkan masyarakat dapat lebih jauh mengenal sejarah bangsanya melalui bangunan Indis.

Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.
Akhirulkhalam. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala,

Drs. BUDIHARJA
NIP. 131474347.

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROP. D.I. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik atas selesainya penyusunan Buku Informasi Museum Tentang Bangunan-Bangunan Indis.

Bangunan-bangunan Indis sangat penting sebagai saksi bisu yang harus di jaga dan dilestarikan keberadaannya oleh kita semua, dengan telah diterbitkannya Buku Informasi Tentang Bangunan-Bangunan Indis oleh Museum Benteng Yogyakarta sebagai museum perjuangan terhadap arti pentingnya keberadaan bangunan-bangunan Indis yang terdapat di Indonesia sebagai suatu peninggalan sejarah yang sangat perlu untuk tetap dilestarikan keberadaannya sehingga tetap dapat diinformasikan dan diketahui oleh generasi muda pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya sebagai pesan sejarah bangsanya.

Kepada para penyusun buku ini dan semua pihak yang telah membantu dari awal terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih.

Demikian kurang dan lebihnya kami mohonkan maaf.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2001

Drs. Sunardjo
NIP. 130177354

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN PEMBAGPRO BENTENG VREDEBURG . DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.	ii
SAMBUTAN KETUA IAAI KOMDA JATENG DIY	iii
SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA	iv
SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROP. DIY	v
DAFTAR ISI.	vii
PENGAJIAN DAN PEMANFAATAN PENINGGALAN ARKEOLOGI MASA KOLONIAL	1
SENI BANGUN GAYA INDIS PENELITIAN, PELESTARIAN DAN PEMANFAATANNYA	4
KELESTARIAN DAN PELESTARIAN ARSITEKTUR INDIS	21
PELESTARIAN BANGUNAN INDIS DALAM MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN DI DIY... 30	
PELESTARIAN DAN PEMANFAAAN BANGUNAN INDIS DALAM PERSPEKTIF PARIWISATA	36
KELESTARIAN DAN PELESTARIAN BANGUNAN INDIS STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG	41
BANGUNAN-BANGUNAN INDIS DI YOGYAKARTA	49
HASIL SENI BANGUN BERGAYA INDIS STUDI KASUS KELESTARIAN SEJUMLAH BENTENG DI JAWA TENGA	61
KELESTARIAN DAN PELESTARIAN BANGUNAN INDIS DI JAWA TENGAH	70

PENGAJIAN DAN PEMANFAATAN PENINGGALAN ARKEOLOGI MASA KOLONIAL

(Edi Sedyawati)

Arkeologi masa kolonial adalah suatu bidang garapan ilmu arkeologi yang di Indonesia belum cukup mendapatkan perhatian yang semestinya. Masih terlalu sedikit ahli arkeologi di Indonesia yang mengkhususkan perhatiannya pada tinggalan-tinggalan masa kolonial ini. Demikian kurikulum program Studi arkeologi di perguruan tinggi belum memberikan tempat pada arkeologi masa Kolonial sebagai pengkhususan yang mantap, hal mana antara lain disebabkan oleh kekurangan pengajar untuk ini. Satu sebab lain dari tertinggalnya arkeologi masa Kolonial ini adalah juga adanya pengertian yang menyesatkan bahwa perbedaan antara arkeologi dan sejarah didasarkan pada batas waktu, dimana diartikan bahwa masa penjajahan sampai sekarang merupakan garapan sejarah, dan masa sebelum itu dimasukkan sebagai garapan arkeologi. Pengertian yang lebih tepat adalah bahwa sejarah ditandai oleh kajian (isi) dokumen/sumber-sumber tertulis, sedang arkeologi ditandai oleh artefak.

Masa kolonial di Indonesia, untuk kebanyakan daerah berimpitan dengan masa kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini sering kali tampak pada adanya pengaruh Eropa pada bangunan-bangunan istana raja dan lain-lain yang kita temukan kembali. Kenyataan ini sudah segera menunjukkan bahwa kata “masa” Untuk menunjukan pada tinggalan –tinggalan tersebut yaitu yang “Islam” maupun “Kolonial”, sesungguhnya dapat menyesatkan “masa” dalam hal ini “masa” pengaruh”, dan ini memang dapat bertumpang tindih satu sama lain. Hal ini dapat terjadi tidak hanya antara “Islam” dan Kolonial” tetapi juga terjadi antara “Hindu-Hindu” dan “Kolonial”, antara “masa Perundagian” dan Hindu-Budha” dan Lain-lain.

Keberimpitan antara “Masa” Islam dan Kolonial itu mengharuskan kita merinci dan mengidentifikasi jenis-jenis peninggalan, khususnya benda-benda tidak bergerak, dari kedua ”Pengaruh” itu. Pertama dapat disebutkan istana raja beserta keseluruhan komplek atau sistemnya. Kedalamnya termasuk bangunan-bangunan tempat tinggal raja maupun para bangsawan dan

pembesar dalam kerajaan yang bersangkutan. Termasuk dalam sistem bangunan-bangunan di kerajaan –kerajaan ini adalah : bangunan-bangunan peristirahatan, pertapaan, pengintaian dan perbentangan, masjid kerajaan dan masjid-masjid yang mandiri, dan lain-lain. Tidak jarang tehnik maupun susunan bangunan-bangunan memperlihatkan pengaruh kolonial Eropa yang amat jelas. Salah satu contoh yang sebenarnya masih perlu dipertanyakan lebih lanjut, adalah adanya parit di sekitar istana. Sampai kini sumber-sumber yang ada mengenai masa Hindu-budha tidak ada yang menunjukkan pada adanya parit di sekeliling istana.

Di hadapan sistem bangunan-bangunan kerajaan islam ini terdapat sistem bangunan-bangunan kolonial, yang terdiri dari bangunan-bangunan yang dilihat dari fungsinya dapat digolongkan “Kolonial” karena melayani kepentingan-kepentingan kaum kolonialis. Sistem bangunan-bangunan kolonial ini terdiri antara lain dari : benteng, kediaman pembesar kolonialis, rumah rumah peristirahatan dan rumah-rumah di perkebunan, pabrik, loji, gedung bangunan tol, toko, dan lain-lain.

Setelah melihat bentangan jenis-jenis peninggalan di lihat dari fungsinya tersebut diatas, maka perlu dibahas gaya bangunan. Gaya ini dilihat baik dari gaya susunan keseluruhan dari suatu bangunan atau kompleks bangunan, maupun dari penggarapan detailnya. Dalam hal bangunan istana raja, pengaruh kolonial yang terlihat pada umumnya adalah pada penggarapan detail, dan bukan pada keseluruhan susunan . susunan keseluruhan tersebut pada dasarnya tetap mengacu pada pandangan kosmologis maupun stuktur sosial yang menjadi kerangka acuan budaya dari masyarakat kerajaan yang bersangkutan. Kalaupun ada koepel untuk orkes di halaman Istana Raja Jawa, komponen kecil ini bersifat ubarampe yang fakultatif apabila dibandingkan dengan bagian-bagian istana lain yang lebih bersifat “wajib”.

Pada titik ini kiranya kita perlu mempermasalahkan pengertian istilah Indisch sebagai penentu identitas suatu bangunan. Persoalan pertama berkenan dengan perspektif. Dalam hal ini kata Indisch tersebut diambil dari bahasa Belanda, dan di dalamnya terkandung perspektif Belanda pula. Yang dimaksudkan seharusnya adalah bangunan-bangunan untuk dan oleh para kolonialis yang dalam perwujudannya mengalami pengaruh lokal, seperti

dibutuhkannya beranda terbuka pada rumah-rumah model Eropa mereka. Kata Indisch itu sendiri berarti “mengandung sifat indie”. Dengan demikian kata tersebut tidak dapat digunakan untuk bangunan-bangunan untuk masyarakat setempat, misalnya istana raja, yang di sana-sini memperlihatkan adanya pengaruh Eropa.

Perlu pula dibahas lebih mendalam apa yang dikutip oleh panitia Diskusi ilmiah Arkeologi VIII ini mengenai definisi “Bangunan Indis” Kutipan itu menyebutkan : “istilah bangunan Indis mengikuti sebutan yang digunakan untuk menengarai kebudayaan Indis, yaitu suatu wujud kebudayaan yang muncul sebagai percampuran antara kebudayaan lokal (nusantara) dengan kebudayaan Eropa”. Pertanyaannya adalah : adakah kebudayaan Indisch itu?. Kalaupun itu ada, siapakah pendukungnya, dan apa kedudukan “Masyarakat indisch” itu dalam tata masyarakat setempat, maupun dalam tata masyarakat dalam kaum kolonialis? Ataupun masyarakat Indisch itu identik dengan keseluruhan masyarakat kolonialis? Pertanyaan yang lebih jauh lagi adalah : apakah bangunan-bangunan kolonial dengan “gaya Indisch” itu merupakan hasil dan milik dari masyarakat atau yang memiliki budaya campuran? Kiranya, masih perlu kita memisahkan antara permasalahan identitas budaya dalam arti luas, dengan permasalahan gaya bangunan yang keduanya di beri label Indisch tersebut.

Suatu persoalan lain berkenaan dengan bangunan-bangunan kolonial itu adalah mengenai statusnya sebagai benda cagar budaya . Kiranya perlu dipahami bahwa tidak semua bangunan yang dibuat di masa Kolonialis adalah dengan sendirinya merupakan cagar budaya. Di samping usianya, ada persyaratan lain untuk menetapkan suatu bangunan sebagai cagar budaya. Persyaratan tersebut adalah : (1) kejadian sejarah yang penting yang pernah terjadi di bangunan tersebut, (2) Keunikan gaya, atau percontohan gaya, atau percontohan fungsi yang unik dari bangunan yang bersangkutan. Untuk menentukan apakah persyaratan pertama atau kedua tersebut dipenuhi diperlukan pengkajian terlebih dahulu.

Selanjutnya , bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya perlu dirawat, bahkan dimana perlu dipugar. Pemanfaatan selanjutnya

memungkinkan pula suatu pengalihan fungsi, sepanjang tidak menghapus data struktural yang bermakna. Dalam upaya menentukan langkah-langkah pemeliharaan dan pemanfaatan ini, maupun dalam upaya indentifikasi BCB itu sendiri, diperlukan keahlian para ahli arkeologi. Kebutuhan inilah yang memberikan relevansi pada pengembangan ilmu pengetahuan arkeologi masa kolonial dalam perguruan-perguruan tinggi kita.

SENI BANGUN GAYA INDIS PENELITIAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATANNYA

(*DJOKO SOEKIMAN*)

I. Penelitian, Pelestarian, dan Pemanfaatannya

Sejak lama sebelum kedatangan bangsa Belanda di kepulauan Indonesia, telah hadir dipulau Jawa orang India, Cina, Arab, dan Portugis. Masing-masing membawa kebudayaan sendiri pada abad ke XVI orang Belanda datang di Indonesia hanya untuk berdagang, kemudian menjadi penguasa Indonesia. Pada awal kehadirannya, mereka mendirikan gudang-gudang (*pakhuizen*) untuk menimbun barang dagangan yang berupa rempah-rempah, antara lain di Banten, Jepara, dan Jayakarta. *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang memiliki modal besar kecuali mendirikan gudang-gudang penyimpanan barang dagangan dan kantor dagang, kemudian memperkuatnya sebagai benteng pertahanan yang sekaligus sebagai tempat tinggalnya. Maksud memperkuat bangunan-bangunan tersebut ialah untuk benteng pertahanan dalam bersaing dengan pedagang-pedagang bangsa lain. Sebelum kekuasaan VOC runtuh dan digantikan oleh kekuasaan kerajaan Belanda yang memerintah secara sistematis pada Tahun 1800, pembangunan kota Batavia dilaksanakan dengan mengambil pola-pola kota di negeri Belanda yang diperkuat dengan perbentengan. Hal semacam itu kemudian juga dilakukan pada kota-kota di pantai Utara Jawa seperti Semarang dan Surabaya. Jan Pieterzoon Coen yang hadir di Batavia pada Tahun 1619 mendirikan kota Batavia yang diawali dengan membangun *pakhuis* (gudang penyimpanan barang dagangan), yang kemudian diperkuat dengan perbentengan. Istana yang sekaligus yang dibangunnya ditepi Timur kali Ciliwung ini kemudian makin berkembang ke daerah pedalaman. Untuk menghindari luapan banjir dibuatlah sejumlah terusan (*kanal*). Rumah-rumah tempat tinggal penghuni Batavia dibangun di sepanjang kanal ini berderet-deret, mengingatkan pada rumah-rumah di negeri Belanda di sepanjang kanal (*gracht*). Semua bangunan itu semula berada di dalam lingkungan tembok benteng kota. Pada tahun 1650, kota Batavia sudah menjadi kota benteng dengan luas kurang lebih 150 Hektar (Stapel, 1929:288).

Benteng semacam ini merupakan tempat tinggal masa awal orang Belanda di pulau Jawa. Segala kesibukan perdagangan dan kehidupan sehari-hari berpusat di benteng semacam ini. Rumah tinggal para pejabat dan segala sesuatu yang dianggap penting atau berharga, seperti arsip, uang, dan kekayaan lainnya disimpan di dalam benteng. Lambat laun karena keamanan di luar benteng makin terjamin dari perlawanan rakyat disekitarnya, banyak pembesar tinggal di luar benteng. Sungguhpun demikian, semua kegiatan pemerintahan, seperti penerimaan utusan bangsa asing, upacara resmi, dan pesta-pesta masih tetap berlangsung di dalam benteng. Dengan kata lain semua detak jantung kegiatan ekonomi kompeni berlangsung di dalam benteng. (Haan, 1935:109).

Gubernur Jenderal Valckenier (1737-1741) adalah pejabat tertinggi yang terakhir tinggal di dalam benteng. Sesudah itu para Gubernur Jenderal penggantinya tinggal di luar benteng. Kemudian setelah keadaan di luar kota dianggap aman dari berbagai ancaman kekacauan seperti amuk dan sebagainya, secara bertahap orang berani bertempat tinggal dan membangun rumah di luar tembok.

Para pejabat tinggi VOC membangun rumah-rumah peristirahatan dengan taman yang luas di sebut *landhuis* dengan mengikuti model Belanda dari abad ke XVIII, dengan ciri-ciri awalnya masih dekat sekali dengan bangunan di Belanda, misalnya rumah Reinier de Klerk di Molenvliet West (kini Gedung Arsip Nasional di jalan Gajah Mada).

Kota Batavia, Surabaya dan Semarang yang semula terletak di kota hilir sungai dianggap kurang sehat, karena dibangun di atas bekas rawa-rawa. Orang-orang Eropa kemudian memindahkan tempat tinggalnya ke pemukiman baru di daerah pedalaman yang dianggapnya lebih dan sehat. Akibat desakan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim, alam sekeliling, demi kekuasaan dan tuntutan hidup sesuai dengan daerah tropis, mereka mendirikan rumah tempat tinggal dan kelengkapannya yang disesuaikan dengan keadaan sekeliling dengan mengambil unsur budaya setempat. Tersebar nya aparat militer dan sipil (lazim disebut pegawai B.B = *Binenlandsbestuur*) ke berbagai pelosok Nusantara, terbukalah daerah-daerah pedalaman sebagai tempat tinggalnya. Saat itulah berkembang percampuran gaya hidup Belanda dan Pribumi yang disebut gaya hidup Indis. Suburnya budaya Indis pada awalnya

didukung oleh kebiasaan hidup membujang para pejabat Belanda. Dengan demikian larangan membawa istri (kecuali pejabat tinggi) dan mendatangkan wanita Belanda ke Hindia Belanda mengakibatkan terjadi percampuran darah yang melahirkan anak-anak campuran dan membuahkan budaya dan gaya hidup Indis.

Bentuk bangunan rumah tempat tinggal para pejabat pemerintah Hindia Belanda yang memiliki ciri-ciri perpaduan antara bentuk seni bangunan Belanda dan rumah tradisional oleh Berlage disebut dengan istilah *Indo Europeesche Bouwkunst* (Berlage, 1924:16), van de Wall menyebutnya dengan istilah *Indische Huizen* (Wall, 1932:2), dan Pamono Atmadi menyebutnya dengan *Arsitektur Indis* (Atmadi, 1984:4). Sejarah Seni Rupa yang mengkhususkan perhatian pada perkembangan gaya bangunan dengan mendasarkan ciri-ciri khusus suatu kurun waktu menyebut gaya bangunan tersebut dengan istilah “bergaya Indis” (*Indische stijl*). Penggunaan istilah ini haruslah dapat dikembalikan dalam hubungannya dengan lingkungan historis, dengan demikian akan dapat diketemukan artinya secara nyata atau untuk menghindarkan dari penafsiran lain, apabila menghadapi proses seperti yang ditunjukkan oleh istilah-istilah tersebut.

Kata “Indis” dalam kaitan ini berasal dari kata *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda, yaitu nama daerah jajahan negeri Belanda di seberang lautan yang secara geografis meliputi jajahan di kepulauan Nusantara yang disebut *Nederlandsch Oost Indie*, untuk membedakan dengan satu wilayah jajahan yang lain yang disebut *nederlandsch West Indie*, yang meliputi wilayah Suriname dan Curascau. Penggunaan istilah gaya Indis atau *Indesche stijl* dalam pembahasan ini dikhususkan pada seni bangunan, rumah tinggal, budaya dan gaya hidup masyarakat pendukungnya yang terbentuk semasa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Penggunaan istilah “gaya Indis” adalah tepat untuk menanamkan gaya seni budaya yang muncul pada abad XVIII. Di Hindia Belanda. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa gaya tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang yang dicipta oleh sekelompok masyarakat di kepulauan Nusantara, sebagai wilayah koloni Belanda. Kata “Indis” bagi bangsa Indonesia saat sekarang dirasakan sebagai kata hinaan, yang meletakkan sebagai bangsa kelas rendah. Namun

sebagai suatu gaya seni budaya yang memiliki ciri khusus yang tidak ada duanya, yang lahir dalam penderitaan penjajahan kolonial, kiranya tidak perlu untuk dirisaukan. Penjajahan Belanda di Indonesia sudah berakhir dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian masa penjajahan tinggal kenangan belaka. Bagi generasi Indonesia berikutnya dapat dijadikan sebagai cermin buruk untuk tidak terulang kembali sebagai bangsa jajahan. Sebaliknya sebagai nama satu gaya seni budaya, kata “Indis” dapat dijadikan tonggak peringatan yang menandai suatu babakan bersama yang hingga sekarang belum ada kesepakatan.

Dalam sejarah seni rupa barat ada yang disebut gaya seni Gothik yang berlangsung antara tahun 1150-1242, dan gaya Barok yang berkembang tahun 1700-1800. Kata Gothik dan Barok mempunyai arti yang juga berkonotasi kurang baik. Kata Gothik dari kata Goth, dan gothia yaitu nama dari salah satu suku bangsa dari Eropa Utara, pengembara yang menyerang dan menduduki Roma pada awal abad I yang dipandang bermartabat rendah. Kata Gothik kemudian dipergunakan untuk menanamkan satu gaya seni yang sangat indah dan megah. Hancurnya satu bangunan gereja bergaya Gothik tidak mungkin untuk dibangun kembali dalam abad XX ini. Demikian halnya gaya seni Barok. Kata Barok dari bahasa Portugal barocco, artinya bulat panjang, tak beraturan, berlebihan, banyak bertingkah (ugal-ugalan) dan tampak suka pamer. Jadi suatu istilah yang tidak enak untuk didengar namun sebagai hasil karya seni yang memiliki suatu keindahan dan kemegahan tersendiri dihati pendukungnya antara lain Rembrandt van Rijn, Velasque dan sebagainya (Godefdroy, 1947:115). Gaya Gothik berkembang di Perancis, Belanda, Spanyol, khususnya seni yang berkaitan dengan kegerejaan Katholik. Di Italia kurang berkembang karena gaya Renaisan lebih dominan.

Gaya hidup dan seni bangunan gaya Indis sebagai satu fenomena histories, adalah suatu hasil karya budaya yang ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: Faktor politik, sosial, ekonomi, seni-budaya dengan semua interelasinya. Disamping itu dapat pula dianggap sebagai suatu kreatifitas karya kelompok atau segolongan masyarakat pada masa kekuasaan Hindia Belanda dalam menghadapi tantangan (challenge) alam sekeliling dan kondisi hidup di alam tropis dengan segala jawabannya (response), menurut kedudukannya

sebagai suatu golongan dalam masyarakat. Suatu bentuk pemerintahan kolonial mengharuskan penguasa untuk bergaya hidup dan membangun gedung dan perumahan tempat tinggalnya dengan menggunakan ciri-ciri dan lambang yang berbeda dengan rakyat yang dijajahnya, sebagai upaya untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya.

Penelitian bangunan gaya Indis dari sudut "seni bangunan" (*bouw-kunst*) belum banyak dilakukan. Pengamatan semacam ini diharapkan akan semakin memperkaya pengetahuan tentang peranan segolongan masyarakat Indonesia dan masyarakat keturunan Eropa dalam pembangunan budaya Indonesia pada masa kolonial. Sangat banyak karangan dari abad XVIII dan XX yang berupa monografi, kesusastraan, kisah perjalanan, foto, lukisan, dan sebagainya yang menyebutkan latar belakang kehidupan masyarakat dan bangunan rumah tinggal bergaya Indis.

Dari sumber berbagai berita berupa foto, karya sastra, dan sebagainya tersebut dapat menunjukkan kemampuan segolongan masyarakat Indonesia dalam mengambil alih budaya asing tanpa meninggalkan budaya tradisionalnya. Benedict Anderson menyebutkan bahwa suku Jawa memiliki "open minded tolerance" atau "savoir vivre" (*lapang dada*) dalam menanggapi kebudayaan asing. Hal demikian ini adalah sebagai akibat pengalaman menghadapi derasnya kehadiran budaya asing di Pulau Jawa. Local genius yang dimiliki suku Jawa mampu menanggapi kehadiran budaya asing dengan aktif. Di kota Kabupaten, Karesidenan, dan Ibu Kota Propinsi terdapat bermacam-macam gaya bangunan yang mewakili jamannya, salah satu diantaranya adalah gaya Indis yang memiliki cirinya sendiri. Bangunan gaya Indis tersebut dahulu kebanyakan sebagai tempat tinggal para pejabat sipil dan militer pemerintah jajahan sebagai penguasa wilayah. Bangunan ini kebanyakan terletak di jalan protokol atau berkelompok di bagian kota. Akibat berkecamuk Perang Dunia II, Perang Kemerdekaan, dan perubahan kebijaksanaan pemerintah, perubahan selera keindahan, atau perubahan tingkat ekonomi, banyak bangunan gaya Indis sepanjang jalan protokol diruntuhkan. Dengan demikian lenyaplah bangunan-bangunan bergaya Indis yang bersejarah dan memiliki keindahan dan keagungan tersendiri kemungkinan makin meluasnya pengaruh barat, khususnya dalam membangun bangunan untuk berbagai fungsi akan mengalami

perubahan dan perkembangan dalam abad XXI dan selanjutnya hal demikian sudah dapat dibayangkan, dengan demikian peninggalan rumah bergaya Indis dan berbagai latar belakang simbolnya diperlukan keberadaannya sebagai bukti sejarah. Penelitian dan pelestarian kebudayaan Indis dewasa ini yang berupa budaya jasmani maupun rohani dirasa masih jauh dari memadai. Dinas Kepurbakalaan dan Permuseuman belum banyak menangani peninggalan hasil karya seni budaya gaya Indis sebagai salah satu rangkaian karya budaya dari salah satu periode sejarah kebudayaan Indonesia. Sebagai fenomena historis gaya hidup, budaya, dan seni bangunan gaya Indis sangat erat hubungannya dengan faktor politik kolonial. Situasi pemerintahan kolonial mengharuskan penguasa bergaya hidup, membangun gedung dan rumah tempat tinggalnya dengan menggunakan ciri-ciri yang berbeda dengan rumah pribumi.

Berlage menyebutkan, walaupun orang Belanda memiliki kemampuan dan peradaban sebagai bangsa penguasa, ternyata memungkinkan pula bangunan dan rumah Belanda terpengaruh juga dengan seni bangunan setempat. Ia menunjuk kasus historis arsitektural dari bangsa Romawi dan Yunani Kuna, yaitu organisme Romawi kuna yang tumbuh dan berkembang akibat dari bentuk seni budaya Yunani. Hal ini semacam berlanjut dan terjadi pula di Hindia Belanda. Barang tentu ke dua pihak saling mengisi, kelompok pertama yaitu bangsa Belanda membawa pola peradaban Belanda ke daerah koloninya, yang akhirnya mengalami perubahan.

Sebagai anggota golongan sosial yang berkuasa untuk membedakan kedudukannya dengan bangsa pribumi, bangsa Belanda sebagai penguasa menciptakan bentuk bangunan rumahnya dengan menggunakan ciri-ciri khusus. Mereka tinggal berkelompok di wilayah tertentu dalam kota yang dianggapnya terbaik dan tertutup bagi bangsa pribumi. Dari tembang Pucung tersebut di atas dapat sebagai contoh tentang bagian-bagian kota Yogyakarta. Aparat pemerintahan kolonial yang direkrut dari suku bangsa pribumi juga membangun rumahnya dengan mengambil unsur-unsur bangunan rumah Belanda tersebut. Hal ini antara lain akibat dari sistem pendidikan Barat yang mereka peroleh dari pemerintah Belanda, disamping pergaulan dan status mereka sebagai pegawai pemerintah kolonial.

Berkaitan dengan perkembangan arsitektur bangunan rumah dan gaya

hidup Indis juga diperkirakan adanya perkembangan yang paralel dan terdapat adanya korelasi yang erat antara ekspansi sistem kolonial, khususnya yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi, politik, industri, edukasi, dan urbanisasi.

II. Penggunaan Unsur Tradisional Jawa Dalam Seni Bangunan Indis

Upaya untuk mewujudkan penggunaan unsur-unsur seni bangunan tradisional setempat (jawa khususnya) telah dilontarkan oleh seorang penulis dengan nama samaran Reflektor di dalam *Indisch Bouwkundig Tijdschrift* (Agustus, 1907:143). Reflektor mengutip dari harian *De Locomotif*, terbitan 30 Juli 1907 yang menyebutkan bahwa Ir. Ch Meyll bertutur bahwa para arsitek Inggris di India berhasil dalam ciptaan-ciptaannya dengan mendapat ilham dan mencontoh arsitektur tradisional pribumi India yang ada di sekelilingnya dan dilihatnya setiap hari. Pada tahun 1890 Kolonel Ganie dan SS Jacob C.I.E, dengan bantuan maharaja Jaypur diberi gambar-gambar karya seni dan ilmu bangunan sebanyak 374 lembar yang sangat berharga, berjudul *Indian Architectural Details*. Naskah tersebut merupakan bahan studi arsitektur yang sangat berharga dari satu karya tentang sesuatu zaman di India, yang hingga kini masih ada. Dimuat detail-detail penuh ekspresi dan mengagumkan, yang sangat berharga untuk bangunan-bangunan modern. Hal seperti ini menurut Ch. Meyll sangat berharga, serta diharapkan contoh tersebut dapat menjiwai dan mempengaruhi teman-temannya sesama insinyur dan Dinas Pekerjaan Umum di India Belanda. Selain itu diharapkan pula akan menggiatkan penelitian dan pencatatan seni bangunan tradisional di India Belanda untuk dipergunakan sebagai ilham atau bahan kajian dalam membangun bangunan modern. Diambilnya contoh bangunan sederhana seperti rumah jaga monyet (*schilwacht huisje*), yang tidak menggunakan plint batu (*steenen plint*), tetapi serdadu penjaga terlindung dari hujan dan panas di samping dapat melihat dengan jarak pandang sejauh mungkin.

Di Singapura penguasa Inggris dan para arsiteknya juga menaruh perhatian seperti halnya di India. Kemampuan genial yang dimiliki rata-rata orang Inggris di British India tersebut seyogyanya dapat dilakukan oleh orang

Belanda sebagai orang asing di bumi Hindia Belanda. Mereka, orang-orang Inggris itu, sebenarnya juga masih diliputi oleh kegelapan mendung tradisi Eropa. Hal demikian ini sebenarnya di daerah tropis, orang lebih bebas untuk “mengambil” atau “memilih”.

Reflector menyetujui dan mengharapkan hendaknya para ahli di Hindia Belanda terpanggil dan sadar untuk bangun dan mengambil sumber-sumber inspirasi dari bumi Indonesia yang tidak ada habis-habisnya antara lain dengan mengambil contoh-contoh dari arsitektur hasil karya bangsa pribumi yang dianggapnya lebih rendah atau tidak beradab. Hendaknya karya-karya yang merupakan ilham dari orang Jawa yang berbakat tersebut dapat dipakai untuk bahan ide membangun arsitektur modern di dunia Timur (Hindia Belanda). Disebutnya bahwa bangunan candi-candi Hindu di Jawa memang bukan diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Pembangunan candi merupakan akar (gua garbha) kehidupan seni bangunan dengan gaya sendiri, dengan citra, cara, dan system sendiri pula. Hal ini merupakan sumber yang tidak habis-habisnya, misalnya dapat diambil ornamennya saja, atau corak seni bangunannya. Sekurang-kurangnya terdapat “gema” atau ilhamnya. Hal ini merupakan kekuatan yang tidak ada habis-habisnya pada suatu gaya atau stil.

Reflector menganjurkan pula hendaknya jangan bersikap memiliki sentimen dan menolak menggunakan unsur-unsur budaya bangsa pribumi. Apabila perlu setidak-tidaknya mengawinkannya sebagai usaha baru dalam penciptaan. Sekalian orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda dianjurkan untuk dapat mengerjakan dan menyadarinya. Orang-orang Eropa yang berbudaya dan tinggal di bumi Hindia Belanda perlu belajar, meneliti, dan mengerjakannya dari hasil karya orang Jawa, Arab, Cina, dan India. Hal seperti ini diperlukan untuk menghadapi adat kebiasaan pada masa lalu dan abad-abad yang akan datang. Hal semacam ini juga diperlukan untuk menghadapi berbagai problema seperti konstruksi bangunan rumah tinggal atau adaptasi gaya penghuninya.

Dengan memperhatikan tulisan Reflector dalam *Indisch Bouwkundig Tijdschrift* (1907) ini, tampak kecenderungan adanya kelompok pakar ahli bangunan di Hindia Belanda yang menginginkan adanya penggunaan unsur

Budaya Tradisional Jawa dalam penciptaan seni bangunan yang kemudian disebut gaya Indis.

Berlage dalam ceramah yang diadakan oleh Vergadering van het Koninklijke Institut van Ingenieurs, pada tanggal 8 April 1924, berjudul *De Europeesche Bouwkunst op Java*, dimuat dalam *De Ingenieurs* (Organ van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs en van de Vereeniging van Delft Ingenieurs, hlm 399-408) menyebutkan dan membenarkan bahwa di Hindia Belanda terdapat dua kelompok pendapat tentang penggunaan/pemakaian seni budaya Jawa dalam bangunan. Kelompok pertama mengutamakan pemindahan dari negeri itu (Belanda), yang menghendaki seni bangunan (nasional Belanda) diberlakukan di daerah koloni khususnya Jawa. Alasannya ialah kemajuan teknik bangunan tidak mudah diduga sebelumnya. Kelompok pertama ini menyebutkan bahwa peralihan menuju ke seni Jawa masih sedikit. Oleh karena itu, tidak ada gejolak yang berarti dalam peralihan bentuk seni bangunan dan pandangan arsitek. Yang ada hanya menggunakan tambahan-tambahan saja, seperti hiasan kepala kala, makara, beberapa macam bentuk kepala tiang, yang menggantikan ciri utama dalam membentuk bangunan.

Kelompok ke dua, merasa dipisahkan oleh kenyataan adanya pertimbangan politik. Mereka lebih mengharapkan adanya peralihan ke seni Jawa yang dapat menuju ke seni Indo-Eropa (gaya Indis), yaitu apabila nantinya Hindia Belanda telah dapat berdiri sendiri.

Dalam kaitan kedua pandangan kelompok tersebut, Berlage menutup pidatonya bahwa pada forum ini bukan tempatnya untuk dibahas semua itu, sungguhpun pada prinsipnya benar juga. Dikatakannya bahwa pada kesempatan ini yang menjadi perhatiannya ialah tentang nilai seni dan peralihan perubahan seni Jawa. Hal itu antara lain didapat dari studi Maclaine Pont tentang pendapa, yang diambil dari kitab *Negara Kertagama* karya empu Prapanca (pujangga dan pendeta agama Budha di Majapahit semasa kekuasaan Raja Hayam Wuruk abad XIV). Kitab *Negara Kertagama* atau *Deqawarna* selesai ditulis pada tahun 1365. Sungguhpun Berlage lebih menekankan pidatonya pada nilai seni dan perubahan/peralihan seni Jawa, di-ketengahkan juga pandangan dua kelompok atau kubu yang berbeda tersebut.

Dari pandangan kelompok (kubu) pertama yang mengutamakan peradapan dari Belanda dikutipnya pendapat Wolff Schoemaker, yang intinya disimpulkan bahwa oleh Berlage bahwa Schoemaker akhirnya berpendapat bahwa gaya Indo-Eropa hanya akan terjadi oleh adanya percampuran yang mendalam antara kedua unsur Jawa dan Eropa, baik unsur konstruksi maupun bentuk seninya. Akan tetapi, yang terakhir ini hanya dapat dicipta oleh orang Jawa sendiri.

Pendapat kelompok (kubu) ke dua, yang menginginkan perencanaan seni bangunan Jawa lebih besar pengaruhnya setelah “Hindia-Belanda dapat berdiri sendiri”, kalimat itu dikutip oleh Berlage dari pendapat koleganya, orang Jawa bernama Soerjowinoto. Inti pendapat Soerjowinoto ialah bahwa seni Jawa juga mempunyai karakteristik sendiri seperti halnya pada seni bangsa Barat atau negeri-negeri beradap lainnya. Pentingnya pemahaman seni Jawa bukan merupakan konservatisme. Pentingnya faktor konstruksi bangunan, kesehatan, dan nilai ekonomi dari bangsa Eropa patut dihargai. Sungguhpun demikian, pada hakekatnya jiwa kenasionalan terdalam yang dimiliki bangsa pribumi (Indonesia) harus dikedepankan. Demikian pandangan Berlage tentang pentingnya memahami gaya seni bangunan pribumi (Jawa).

Dari kutipan pidato Berlage tersebut jelaslah sudah akan peran orang pribumi (diwakili Soerjowinoto) yang berusaha mengedepankan peran karya seni bangunan pribumi dalam membentuk bangunan gaya Indis. Pandangan Soerjowinoto ini didukung oleh para pakar seperti Ir. V.I. van de Wall, Ir. Karsten, dan sebagainya.

III. Penelitian dan Pelestarian Bangunan Indis

Upaya untuk mencatat, meneliti, dan melindungi bangunan-bangunan dari masa VOC dan masa kekuasaan kolonial di Hindia Belanda, sudah dirintis oleh P. De Roo de la Faille, mantan ketua Koninklijk Bataviasche Genootschap pada tahun 1929. Upaya meneliti dan memelihara bangunan seni tersebut di dukung oleh Kepala Dinas Purbakala (Oudheidkundige Dienst), yang pada waktu itu dijabat oleh Dr. Van Stein Callenfels. Undang-undang perlindungan bangunan kuno dan benda purbakala, serta cagar budaya yang dianggap mempunyai nilai sejarah, seni, dan keunikan khusus yang

mewakili jamannya, baru diputuskan dan diundangkan dengan adanya Monumenten Ordonantie (MO) yang berlaku sejak tahun 1931. Undang-undang Monumenten Ordonantie tahun 1931 tersebut sudah terlambat, tetapi beruntung belum sangat terlambat, karena keadaan bangunan kuno dari masa kehadiran orang-orang Eropa sebelum abad XIX itu masih banyak yang tersisa, dan anak keturunan para penghuninya pada waktu itu masih ada.

Pencatatan dan penelitian peninggalan kepurbakalaan oleh Oudheidkundige pada waktu itu belum banyak berhasil, karena berbagai situasi, antara lain masalah pengukuran dan penggambaran yang meminta waktu dan tenaga yang banyak. Diakui pula tenaga ahli yang berkemampuan menangani berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan penelitian kekunoan tersebut di atas sangat kurang. Dinas Purbakala yang bertugas menjaga, mengawasi, dan memelihara semua peninggalan kepurbakalaan yang terdiri dari masa peninggalan masa prasejarah, Jawa-Hindu, Islam dan Eropa, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut sudah merasa kewalahan. Penelitian dan Penulisan tersendat-sendat dan terhenti pada masa kedudukan bala tentara Jepang dan awal masa kemerdekaan Republik Indonesia.

Penelitian peninggalan gaya Indis oleh Oudheidkundige Dienst sebelum Perang Dunia II, terutama baru ditekankan pada bangunan-bangunan besar dan bagus milik para pembesar atau penguasa Hindia Belanda dan tuan-tuan tanah kaya, Bangunan-bangunan itu sebagian besar terletak di Karisedenan Batavia dan beberapa Ibu Kota Provinsi di Jawa dan kota besar di luar Jawa, serta diberbagai perkebunan yang pada waktu itu masih dalam keadaan bagus. Disamping itu juga masih ada sisa dari beberapa bangunan landhuzen yang sudah runtuh atau yang hanya berupa puing-puing berupa pintu-pintu gerbang, bangunan tempat menggantungkan lonceng (klokkestanden), rumah tinggal untuk para budak, dan rumah untuk tempat bermain musik atau gamelan. Yang harus tidak dilupakan, dalam hal ini yaitu yang berkaitan dengan sangkut-paut kegunaannya bagi kehidupan pada waktu itu. Hingga saat ditulisnya laporan oleh van de Wall pada bulan april 1929, bangunan-bangunan rumah besar landhuizen yang masih ada, dan dalam kondisi baik di sekitar Batavia antara lain rumah Gunungsari (kini menjadi

klenteng Cina di Gang Sentiong), Tjitrap, Rustenburg, Tjililitan Besar (kemudian menjadi markas Kepolisian), Struiswijk, Semplicitas, Pondok Petung, Penumbeng, Grogol, Japan, Tapos, Kebun Jeruk, Rumah Reinier de Klerk (kemudian menjadi Gedung Arsip Nasional RI), dan masih banyak lagi. Landhuizen berikut ini yang dianggap tidak terdapat adanya keistimewaan hiasan, atau sudah dibangun ulang yang lebih modern, dan yang tidak memiliki nilai seni, tetapi mempunyai nilai kepurbakaaan antara lain : di Gandaria Utara, Pesing, Tanjung Grogol, Cilangkap, Pekayon, Kalideres, Cipinang, atau Vrededal, Kampung Makasar, Tanjung Barat, dan Pulau Tanjung Besar, sementara itu yang dari pengamatan dianggap penting, yaitu bangunan rumah dengan arsitektur pengaruh Cina, antara lain : Tanah Rendah, dan Tanah Rendah Patukangan. Arsip berupa foto dari Oudheidkundige Dienst yang dapat membantu untuk mengamati dengan tepat, kini masih ditemukan di negeri Belanda dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta dalam jumlah ratusan ribu foto, Foto-foto tersebut memuat gambar tentang berbagai tipe rumah tinggal dengan bangunan sampingnya dan bangunan umum seperti stasiun, perkantoran, jembatan dan sebagainya. Foto tentang interior bangunan yang di dalamnya terdapat mebelair dan berbagai kelengkapan rumah tangga gaya Indis yang sangat berharga, masih tersimpan dengan baik. Sementara itu lingkungan (situs) yang dianggap bernilai histories, dan berbagai bentuk reruntuhan banyak yang belum diteliti. Di ruang bagian penyimpanan peta arsip kerajaan di Den Haag, juga tersimpan sejumlah lukisan bangunan yang berharga, dan gambar denah bangunan dari rumah-rumah yang bagus. Semuanya memberikan gambaran nyata (denkbeeld) tentang arsitektur beserta isinya dari masa kekuasaan Hindia Belanda di daerah tropis (Indonesia). Jauh sebelum itu juga terdapat beberapa penulisan sejarah tentang Bataviasch Thuijnen yang dilakukan orang di luar kedinasan (oudheid Kundige Dienst). Seni bangun rumah mewah yang merupakan prototype gaya Indis, dapat dikenali dengan adanya beberapa tipe atau bentuk. Tiga bentuk awal yang utama ialah: (1) bangunan rumah mewah gaya Indis kuna (Het landhuis in oud Indische Stijl); (2) Rumah mewah bergaya Belanda Kuna (oud Hollandsche stijl); (3) bangunan rumah bergaya Kompeni (Compagniestijl); Bangunan yang didirikan oleh Perusahaan Perumahan Kotapraja Gemeentelijk Woningbedrijf);

Jawatan Kereta Api, Pelayaran, Onderneming, dan sebagainya.

Adapun ciri-ciri pokok dan contoh bangunan dari masing-masing gaya (stijl) seperti tersebut di atas, antara lain dapatlah diuraikan sebagai berikut:

Pertama (1), bangunan rumah tinggal mewah gaya Indis kuna (het landhuis in oud-indesche stijl): Ciri-cirinya antara lain dengan atap yang rendah dengan teritisan yang menjorok ke depan, dengan serambi yang luas. Bebatur (lantai) rendah, sebuah lorong (gang) membagi dua seluruh bangunan di dalam rumah, dengan batasan-batasan kamar-kamar yang membagi seluruh rumah. Sebagai contoh yang bagus dari gaya ini yaitu rumah: Simplicitas, Teluk Pecung, Tapos, Cilodong, Pondok Petung, Japan, dan Resteburg. Inilah contoh terbagus dari Oud Indische Landhuis. Bangunan Oud Indische Stijl ini pada dasarnya berawal dari meniru beberapa ciri-ciri dari unsure warga pribumi, yang kemudian terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan:

a). Ketinggian bangunan; b). Keluasan ruang-ruang; c). Kebutuhan akan sinar; d). Keteduhan di dalam rumah, kesemuanya itu adalah tuntutan yang pada waktu itu sangat dibutuhkan oleh nenek moyang orang-orang keturunan Belanda yang tinggal di Indonesia. Rumah tipe ini sangat bagus dan tepat dengan suasana alam lingkungan, serta dapat dipertanggung jawabkan dari segi kesehatan, sebab di dalamnya selalu teduh dan sejuk, sangat sesuai sebagai tempat tinggal. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan bangunan yang tertutup seperti bangunan rumah di Eropa yang beriklim dingin.

Kedua (2), rumah tinggal dan pasanggrahan dalam bentuk Oud Hollandsche Stijl, dengan ciri utama antara lain, sebagai tempat tinggal Groot patriciershuis (rumah seorang pembesar yang kaya raya). Bangunan ini merupakan rumah besar bertingkat yang tampak depannya luas.

Di atas atap terdapat Uilenzolder, yaitu bangunan rumah-rumahan kecil berbentuk seperti perwujudan burung hantu (kuku beluk) yang berfungsi sebagai hiasan dan penyejuk ruangan. Pada halaman belakang rumah dibangun tempat tinggal untuk para budak. Adanya bagian bangunan untuk tinggal para budak tersebut adalah salah satu ciri kebudayaan Indis yang tidak dikenal di

negeri Belanda.

Dapat dikatakan, bahwa bangunan ini merupakan rumah yang mempunyai ciri tertutup, seperti umumnya pada bangunan rumah di negeri Belanda yang berhawa dingin. Ciri seperti ini terdapat pada bangunan rumah Reinier de Klerck, kini Gedung Arsip Republik Indonesia di Jalan Gajah Mada.

Ketiga (3), rumah mewah atau pesanggrahan yang disebut *Compagnies stijl*, yaitu tipe bangunan rumah atau pasanggrahan yang berbentuk *Oud Hollandschestijl*, tetapi ada bagian yang dirubah, disesuaikan dengan lingkungan alam tropis, dan dipengaruhi serta dilengkapi dengan ciri-ciri bangunan Indis. Tegasnya bentuk bangunan gaya Kompeni (*Compagniesstijl*) ini ialah sebuah kombinasi dari ke dua tipe benguna tempat tinggal dengan ciri-ciri: *Oud Hollandsche Stijl* dan *Landhuis in Oud Indische Stijl*. Ciri-ciri gaya bangunan yang indah, mewah, tetapi tampak aneh ini menurut Barlage berbentuk sangat ganjil. Sesudah mengamatinya disebutkan bahwa gaya bangunan seperti itu sebagai suatu gaya yang sangat menarik dan menyenangkan sebagai tempat tinggal penguasa.

Bangunan rumah gaya Kompeni biasanya bertingkat dan berukuran besar, serta kaya akan ragam hias. Dengan demikian gaya ini bagi obyek penelitian dari pandang sejarah seni rupa adalah sangat penting. Bagian bangunan lantai bawah sisi depan dan belakang terbuka (inilah ciri utama rumah gaya Indis) dan lantai bangunan atas adalah tertutup (ini ciri utama gaya Eropa), yang terlindung oleh sebuah atap dengan teritisan yang menjorok jauh ke depan.

Kombinasi seperti ini tidak seimbang, karena bangunan bertingkat dengan atap yang berat, seharusnya tidak disangga oleh batang-batang tiang yang memberi kesan berat dan kokoh. Rumah Gubernur Jenderal Reiner de Klerck yang berciri gaya kompeni di Jalan Gajah Mada misalnya sangat mirip dengan bangunan rumah Belanda di negeri Belanda, namun tidak seluruhnya sama, unsur-unsur pengaruh Indonesia terdapat juga. Bangunan ini bertingkat tetapi tampak adanya tidak keserasian. Kombinasi ini tampak tidak seimbang, karena atap bangunan tingkat bagian atas yang berat, seharusnya tidak disangga oleh batang-batang tiang yang masif. Sebagai

contoh lain yang bagus untuk rumah pesanggrahan bergaya Kompeni, yaitu dengan terdapat di Tanjung Timur dan Pondok Gede, juga rumah Weyerman di Cengkareng. Adapun bangunan yang tidak disebut sebagai rumah tipe peralihan menuju tipe bergaya Kompeni ialah: Tjitayam yang tampak depannya (voorgevel) tertutup, sedang achter gewel (tampak belakang) terbuka dan tanpa verdiping (tingkat).

Adanya penggantung lonceng di halaman, memberi kesan rumah dan lingkungannya lebih luas. Disinilah bangunan penggantung lonceng ini merupakan sebuah “permata” yang indah bagi pandangan keseluruhan. Perubahan dan tambahan dari gaya Eropa pada jaman Kompeni tampak berjiwa Indis, antara lain justru dengan adanya bangunan penggantung lonceng dan bangunan untuk bermain gamelan atau musik. Sementara Sarjana Belanda menyebutkan, dengan tambahan bangunan-bangunan seperti ini (panggantung lonceng dan sebagainya) adalah merusak keindahan. Hal ini oleh sementara orang dianggap sebagai sangat merugikan, dan “mencoreng” semua karya keindahan gaya seni Eropa asli. Sungguhpun demikian, menurut hemat penulis ada pentingnya atau manfaatnya juga, karena hal seperti ini merupakan suatu bukti tentang sebuah bentuk plastis dari suatu jiwa seni masyarakat Indis pada jaman kolonial di Indonesia. Ungkapan jiwa seni Indis yang dihancurkan dengan perasaan tanpa sadar yang “dianggap merusak” keagungan keindahan seni Eropa tulen yang dianggap luhur itu, sebenarnya tidak sepenuhnya dibuat dengan kesadaran nalar.

Keempat (4), bangunan yang didirikan oleh gemeente atau Jawatan seperti di Tjihapit, DKA Pengok, Pabrik gula, Perkebunan dan sebagainya yang sampai sekarang masih banyak dijumpai di berbagai propinsi.

Pemberitaan yang luas, menyebutkan bahwa Batavia pada jaman kompeni dan masa Hindia Belanda disamakan dengan kota terbagus di dunia Timur. Hal ini tercermin pada bagian kota yang bagus dengan rumah tempat tinggal para pembesar, khususnya rumah mewah di luar kota Batavia yang disebut thuyenen atau landhuizen tersebut. Wilayah lingkungan yang disukai sebagai tempat mendirikan pesanggrahan ialah di berbagai kota pedalaman Pulau Jawa, yang memiliki banyak keindahan alam.

Setiap orang asing yang pernah di Batavia, dan telah melihat banyak tentang hal kemegahan landhuizen dan keindahan alam sekelilingnya, tidak habis-habisnya, membicarakan akan keanehan dan kekaguman pada karya-karya seni bangunannya. Ingatan dan pengalaman itu kemudian dibukukan. Nama-nama pemilik landhuizen dari suatu tempat yang ternama dituliskan dengan anggapan sebagai sanjungan kekayaan raja putri dari Timur. Catatan perjalanan karya Valentijn, Nicolaas de Graaf, Corelis de Bruijn, Heydt, Hofhout, Haafner, Stavorinus, dan seorang penyair atau pencipta sastra seperti Jan de Marre, tidak melewatkan begitu saja dorongan jiwanya untuk selalu melanjutkan keindahan berupa “karya seni sastra” sebagai luapan kekaguman gaya hidup dan seni Indis. Pujian dan kekaguman tumbuh juga setelah terpengaruh oleh penerimaan yang akrab dan ramah oleh tuan rumah yang tulen Indis, terhadap tamu-tamunya yang sedang dalam perjalanan jauh atau sedang melakukan pelancongan itu. Tentu saja penggambaran tertulis itu tidak dapat diresapi dengan baik atau sempurna oleh para pembacanya tanpa melalui jasa karya lukis, seperti karya-karya J. Rach, Heydt, Bik, dan sebagainya. Patut diucapkan terima kasih kepada para pelukis dan penulis tersebut, karena para pengamat dan peneliti kemudian dapat melihat dari buah tangan mereka suatu objek yang ditulis pada jamannya. Dengan demikian pembaca dan pengamat dapat membayangkan bentuk bangunan, tempat tinggal, dan gaya kehidupan para penghuninya sehari-hari. Berkat karya seniman tersebut banyak buah budaya gaya Indis pada jaman itu terekam.

Karya lukis yang sangat berharga antara lain bangunan de thuijn milik Gubernur Jenderal Andrean Valckenir. Disamping keagungan bangunannya, juga berupa karya seni rupa lainnya, yaitu berupa seni ukir, seni patung, sangkar-sangkar burung, air mancur dengan kolam-kolam, serta rerumputan, dan tanaman yang dipangkas indah.

Adapun lukisan karya J. Rach tentang landhuis Weltevreden milik Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra menunjukkan sebuah contoh yang bagus akan selera keindahan para pemilik landhuizen pada jaman itu. Dari lukisan-lukisan itu dapat ditunjukkan akan tingginya pemahaman artistik orang-orang pada jaman itu, termasuk kemampuan mencipta keindahan untuk rumah tinggal dengan symbol-simbol keluarga (*gedenkteeken*) yang masih

banyak tersisa. Para pemilik landhuizen selalu gandrung pada kehidupan lama yaitu di alam bebas, terbuka dan hidup di luar rumah.

Jiwa kepeloporan atau rasa keindahan seperti ini khususnya dalam membangun landhuizen ternyata hanya merupakan karya “tiruan” saja, yaitu mencontoh seperti lingkungan istana-istana di negeri Belanda. Hal seperti ini kemudian dikembangkan tidak saja hanya meniru rumah bangunan dari bahan kayu dengan atap dari jerami seperti di negeri Belanda yang juga dikenal di daerah tropis Jawa, tetapi juga kemudian disusul dengan mendirikan bangunan-bangunan rumah mewah yang mengagumkan, mirip puri-puri dari Abad Tengah di Eropa dengan parit-parit berair yang mengelilinginya. Dari pangkal “meniru” inilah orang, khususnya para pejabat kolonial di Batavia mulai membangun rumah mewah yang akhirnya menuju ke arah bentuk bangunan sesuai selera sendiri (gaya Indis).

Orang-orang yang hidup masa sekarang dapat melihat karya seni bangunan landhuizen yang terbuat dari bahan kayu antara lain dari karya lukis J. Rach, yaitu rumah pesanggrahan Seringsing milik Chastelijin di Meester Cornelis. Landhuizen Cilebut di Buitenzorg yang dilukis oleh TH. Big pada tahun 1854. Bangunan rumah pasanggaraan sederhana dari kayu jati ini dengan ciri gaya Indis Kuna (Oud Indische Stijl). Sebaliknya bangunan lainnya yang mewah mirip istana di Eropa yaitu rumah milik Van de Parra, yang dapat dikatakan tidak lagi boleh disebut dengan predikat pesanggrahan karena begitu megahnya.

Untuk memahami gaya (stijl) seni bangunan buah karya masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda diperlukan ketajaman dan pemahaman pengertian tentang gaya (stijl). Kata stijl dari bahasa Belanda penulis salin dengan bahasa Indonesia “gaya”, atau barangkali lebih tepat disalin dalam bahasa Jawa Ce’ngkok. “Gaya” yaitu suatu bentuk yang tetap atau konstan yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang, baik dalam unsur-unsur kualitas maupun ekspresinya misalnya dalam hal menulis, berjalan, gerakan badan, karya seni dan sebagainya. Hal seperti dapat digunakan sebagai ciri kepada kegiatan seseorang atau kelompok masyarakat (Meyer Schapiro, “Style”, Antropologi Today, 1953:287).

Seorang arkeolog mengutamakan pada pola (patten) atau motif untuk memahami karya budaya yang dapat membantunya dalam melokalisasi dan mendata (localize and date) suatu karya budaya. Pengetahuan ini kemudian dikembangkan dalam upaya mencari hubungan antara karya satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Adapun bagi ahli sejarah seni rupa, pengertian gaya adalah objek yang pokok dan esensial dalam pengamatan dan penelitian berbagai karya seni.

Ada empat atau lima macam pengertian stijl (gaya) yaitu: a). Gaya objektif (objective stijl), b), gaya subjektif (subjective stijl atau persoanlijke stijl), c), gaya massa (nationale stijl), dan d), keistimewaaan gaya teknik (technische stijl). Keempat gaya tersebut di atas selalu berkaitan dengan suatu jaman atau waktu yang disebut stijl periode (gaya jaman). Dengan memahami dengan sadar akan pengertian tersebut diharapkan membantu penelitian suatau hasil karya seni (berbagai cabang seni).

Kebudayaan Indis sebagai hasil perpaduan dua kebudayaan Indonesia dan Eropa mencakup seluruh aspek tujuh unsur universal budaya bangsa seperti yang dimiliki semua bangsa di dunia. Dengan demikian kebudayaan Indis adalah kebudayaan atau sub kultur yang merupakan kepanjangan kebudayaan Indonesia yang terdiri atas kebudayaan pra sejarah, kebudayaan Indonesia-Hindu, dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kebudayaan Indis adalah produk dari pengaruh kebudayaan barat sebagai bagian dari kebudayaan modern Indonesia. Kebudayaan Indis di Indonesia berakhir sesudah bala tentara Jepang mengalahkan penguasa Hindia Belanda dalam tahun 1942. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan di Proklamirkannya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kebudayaan Indis telah berakhir di wilayah Republik Indonesia dan tidak dapat berlanjut seperti kedudukanya semula. Di Negeri Belanda ternyata kebudayaan Indis tetap berlangsung hidup, bahkan dalam akhir abad XX ini masyarakat keturunan Indo dan Belanda yang pernah tinggal di Hindia Belanda masih melestarikan gaya hidup Indis. Pasar malam Tong-Tong di Den Haag dengan berbagai acaranya menggelar berbagai pertunjukan, “tempo doeloe” seperti keroncong, stambul, dan sebagainya. Di berbagai kota di negeri Belanda terdapat Indische Restaurant yang menyajikan Indische rijsttafel dengan Indische menu berupa

nasi goreng, sambal goreng, sate, lumpia, wedang sekoteng dan sebagainya. Banyak orang Belanda dan Indo atau yang pernah tinggal di Indonesia berkeinginan untuk datang bernostalgia dan melihat kembali Indonesia.

Setelah mengamati dan mengikuti perkembangan kebudayaan Indis, khususnya gaya hidup, karya seni, dan budaya masyarakat pendukungnya penulis perlu menyampaikan saran-saran untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti pelestariannya. Dua hal yang penulis mohonkan perhatian, yaitu:

A. Berhubungan dengan Seni Karya Budaya Jasmani

1. Seni bangunan. Sampai saat sekarang (akhir abad XX) banyak peninggalan seni bangunan gaya Indis baik berupa bangunan gaya Indis, baik berupa bangunan rumah tinggal, maupun bangunan umum (seperti: perkantoran, gedung pertemuan atau societieit, benteng rumah tinggal dan rumah dinas pejabat, stasiun, jembatan, dan sebagainya) banyak yang sudah hancur atau digusur, disamping yang masih tertinggal dan berdiri dengan megah dan kokoh. Bangunan-bangunan gaya Indis yang memiliki nilai histories, arkeologis, dan estetis, yang mewakili jamannya patut dilestarikan diteliti, dan diselamatkan. Di antara berbagai gaya bangunan yang pernah berkembang di Indonesia, seni bangunan gaya Indis memperkaya keindahan kota-kota di Indonesia. Pemandangan kota dengan bangunan-bangunan megah yang memiliki ciri berbagai gaya seni yang mewakili jamannya, menjadikan suatu gaya tarik kunjungan turis yang akhirnya dapat mendatangkan devisa yang besar.
2. Karya seni rupa dan seni kerajinan. Barang-barang karya seni rupa gaya Indis yang terdiri dari seni lukis, seni patung/relief, bangunan dan seni kerajinan, (termasuk seni jauhari yaitu kerajinan membuat perhiasan dari emas, perak, dan batu mulia) tidak menjadi koleksi museum-museum di Indonesia. Akibatnya anak-cucu bangsa Indonesia kurang mengenal berbagai karya seni dan seni jauhari nenek-moyangnya, khususnya dari masa abad XVIII sampai dengan medio abad XX. Beruntung bahwa berbagai seni pertunjukan (drama) dan seni musik (seperti keroncong dan sebagainya) tetap berlangsung hidup dan berkembang.

B. Berhubungan dengan Karya Budaya Rohani

Hasil budaya dari masa Hindia Belanda pada sementara orang ada yang menganggap sesuatu yang negatif, misalnya merendahkan derajat orang kulit berwarna, mendidik jiwa feodal yang sempit. Sebaiknya peninggalan budaya yang positifpun cukup banyak antara lain: upaya mencerdaskan bangsa, menekuni ilmu pengetahuan, disiplin, menghargai waktu, meyenangi kebersihan, dan sebagainya. Budaya Indis yang bersifat positif patut diteruskan dan dikembangkan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlage, H. P. *Studies Over Bouwkunst, Stijl en Samenlaving*, Rotterdam, Z.J. Brusse, 1910.
- , *Mijn Indische Reis, Gedachten over Cultuuren Kunst*, Uitg. N.V. Rotterdam, 1931
- Breton de Nijs, E. *Tempo Doeloe, Fotografische documenten uit oud-Indie 1870-1914*. Amsterdam: Querido's Uitg, 1961
- Djoko Soekiman "Gambar sebagai Media Pembantu Berita Peradaban". Di dalam *Tantangan Kemanusiaan Universal*. Penerbit Kanisius, 1992.
- Duncan, James, B. *Housing and Identity, Cross Cultural Perspectives*. Croom Helm, London, 1981.
- Locher, G.W. "Huis, Macht en Staat" di dalam *Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde*, deel 144, ieaf1, 1985, (Holland Fors Publ, 1985).
- Parmono Atmadi. *Arsitektur Tempat Tinggal, Pengaruh Hindu, Cina, Islam, Kolonial, dan Modern*. Seminar arsitektur Tradisional di Surabaya (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 8 Januari 1986).

- Schuurman, A.J. De Wooncultuur, De Studies Van Woonculturen in het
Verleden Als Social-economiache Geschiedenis, red. P.M.M. Klep;
Amsterdam, 1987.
- Wall, V.I. van de. Indesche Landhuizen en Hun Geschiedenis. Kon. Bat.
Gen. Van Kunsten en Wetenschappen, Batavia, 1932.
- Oude Hollandsche Bouwkunst in Indonesia. Bijdragen tot de Kennis van
de Hollandsche Koloniale Bouwkunst in de XVII en XVIIIe Eeuw.
(Utrecht: Uitg. Mij W. de Haan N.V. MCMXLII).
- Wolffin, Heinrich . Stijl Begrippen in De Kunst Gescheindenis. Utrecht: Aula
Boeken, 1960.

KELESTARIAN DAN PELESTARIAN ARSITEKTUR INDIS

(*Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc*)

Dalam harian Kompas edisi 14 Maret 1996 yang meliput kongres dan Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) VII termuat tudingan bahwa para arkeolog “hanya berkuat seputar masa lalu dan tak ada sumbangannya bagi pembangunan bangsa dan negara”. Di sisi lain, para arsitek pun dikecam karena banyak mengidap obsesi terhadap kecanggihan teknologi dan modernitas, nyaris melupakan akar dan warisan budaya masa silam.

Tudingan, kecaman, dan cercaan semacam itu bermunculan antara lain karena para arsitek dan arkeolog termasuk kelompok profesional yang lebih menikmati kerja di lapangan. Tidak termasuk katagori *avalid writers and readers*. Tidak terlalu bersemangat menulis atau membaca karya ilmiah, atau memasyarakatkan gagasan dalam bentuk tulisan populer di media massa.

Tak pelak lagi timbullah kesenjangan dan miskomunikasi.

Kecenderungan yang tidak menguntungkan itu perlu ditanggulangi. Tindakan kiprah dan kegiatan pelestarian bangunan Indis harus diawali terlebih dahulu dengan kesesuaian pemahaman dan kematangan falsafah yang melandasinya.

Antara *text* dan *context*, antara konsep dan bentuk, sebetulnya terjalin ikatan yang sangat kuat ibarat pasangan tak terpisahkan antara ruh dan badan, emosi dan rasio, surgawi dan duniawi.

Arkeolog, arsitek, planolog, sosiolog, psikolog, seniman, budayawan, dan lain-lain mesti duduk satu meja untuk saling bertukar gagasan.

Arkeologi Masa Depan

Dalam bukunya “*Architecture in Continuity*” (1985), Sherbon Contacuzino menyebutkan bahwa “*Architecture is archeology of the future*”. Nah, arsitektur Indis tampil sebagai bukti fisik dan visual yang menyuguhkan perpaduan yang kental antara gaya arsitektur teknologi dan bahan bangunan baru yang datang dari Eropa dengan iklim, budaya, dan seni kriya setempat. Sengaja saya menyebutkan istilah arsitektur Indis - bukannya bangunan Indis-

karena begitu saratnya nuansa estetika atau keindahan (venusitas) yang melengkapi aspek fungsi atau kegunaan (utilitas) dan konstruksi atau kekokohan (firmitas). Yang disebut bangunan lazimnya hanya memenuhi dua aspek yang disebut terakhir.

Arsitektur Indis telah memenuhi kaidah 5 C dalam perencanaan arsitektur yang berjati diri : Continuity and Connectivity of Culture, Climate and Craft.

Sebagai suatu karya yang sudah merupakan bagian dari sejarah. Sudah sepantasnyalah bila peninggalan kolonial berupa arsitektur Indis dilestarikan. Bahkan sebetulnya yang harus dilestarikan bukan hanya terpancang pada arsitektur Indis yang berwujud bangunan saja, melainkan lebih luas lagi yaitu berupa kawasan bersejarah (historic district) atau bahkan kota Indis.

Ini yang saat ini dicoba di Semarang, dengan upaya merevitalisasi kawasan pusat kota lama yang dipromosikan dengan sebutan “Little Nederlands”. Hasil penelitian tentang konservasi bangunan dan lingkungan bersejarah di Semarang yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Undip. Berhasil menetapkan daftar dan urutan peringkat bangunan kolonial yang layak dilestarikan. Tiga kawasan bersejarah telah direkomendasikan untuk dikonservasi, yaitu kawasan disekitar gereja Blenduk, kawasan sekitar Tugu Muda (dengan primadona gedung Lawang Sewu), dan kawasan sekitar Taman Diponegoro (dengan primadona Rumah Sakit Elizabeth).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut Walikotaamadya Semarang kemudian membuat SK Walikotaamadya tentang konservasi bangunan yang meliputi 101 bangunan dan menetapkan kawasan pusat kota lama sekitar Gereja Blenduk sebagai kawasan yang harus dilestarikan.

Terlampir kami sertakan makalah yang telah kami paparkan dalam forum UNESCO Training on Conservation of Cultural Heritage di Hanoi Tahun 1996 yang silam, berjudul “Conservation of Little Netherlands”, sebagai bahan untuk dikupas lebih mendalam.

CONSERVATION OF "LITTLE NETHERLANDS" IN SEMARANG

Semarang is the capital of Central Java Province, with a population of 1, 2 million people in 1996. As a fast growing coastal city. Located in the middle of the development belt between Jakarta and Surabaya (two biggest metropolises in Indonesia), Semarang has to face severe problems in its attempt to keep the historical buildings intact.

We have witnessed a series of destruction and demolition of old historic buildings in Semarang to make way end give spaces to new modern or post modern buildings which are often insensitively designed, unfit to their unique surroundings. The intrusion of new buildings in a metropolis like Semarang is unavoidable, in order to cater for contemporary need or new functions. However, if those building are designed without due respect to the uniqueness, character, or ambiance of the historic environments of the city, we can call it as an act of "cultural harassment".

This paper is concerned with the problems of conserving the old city center of Semarang, which is popularly known as "Little Netherlands". Some ideas will be put forward to save and revitalize the historic district that are still full of Dutch colonial architecture, to let next generation have the chance to know the visual truth about our history.

Up till the present day, Indonesian urban managers who have the power and the entrepreneurs whose main aim is to gain profit, still perceive historic conservation as a luxury they can ill afford either in time, money, thought, or energy. It is time to change the perception. If we can convince them that conservation not only contributes to the upholding of human spirit and enhancing the quality of life, but profitable as well, then the Power-holder and the Profit-seeker might truly be partners to the Planners and the People. Therefore, the key challenge for the near future will be to integrate historic conservation into the very psyche of the whole community, as an integral part of everybody's expectation.

Reasons For Misconduct

The assassination and disappearance of cultural heritage in the most strategic areas within the city were usually conducted by the private sector, with the permission of the local government officials. It can be termed “architectural suicide”, and we are unfortunate that there are no graveyard for the demolished buildings, where we can pay respect. As we may already know, among the 4 P’s mentioned above (Power, Profit, Planner, and People), the first two are the most influential in the creation of the build environment.

There are several reasons for this misconduct, among others :

- A). Economic development pressures, particularly along the main roads in the most strategic areas in the city.

The booming of high rise office buildings, shopping centers, department stores, up to the recent trend of ‘Super-Blocks’, can be clearly seen in most big cities, coupled by the disappearance of the historic quarters of the city, including the old close-knit community and neighborhoods. In some cases the whole Kampong settlers had to be evicted. No wonder that the popular term of Urban Renewal is often called Urban Removal.

- B). Most government official makers are so obsessed with modern, which they see as a real sign of progress.

Conservationists are accused as hindering and stopping progress, whether on the street or in court.

The act of conservation is often viewed as an irrelevant at best an impediment at worst. It looks pale in comparison to development while actually it should be seen as two complementary sides of the same coin.

A city without old historic buildings is just like a man without memory.

- C). Some prominent persons of the older generation felt ashamed of their own past, so eager to erase the bitter times during Dutch period, not wanting their younger generation to witness any sign of colonization. It is in fact peculiar and illogical, bearing in mind that

even the Australians harassed by the very fact that their ancestors were prisoners from Britain. History is history, not 'his story'.

- D). There is some kind of prejudice towards particular ethnic community such as Chinese, so that the existence of several Chinese towns are left deteriorating on purpose. Furthermore, the Chinese architectural heritages (temples, tombs, gates) are not listed as cultural heritages to be conserved, despite the facts that they are very unique, have a long history, and still utilized at particular times for Chinese rituals and ceremonies.

Sam Poo Kong and Pecinan or Chinatown is actually an integral part of the history of Semarang and the diverse mix of architecture, people and services has always made it a unique area of the city.

- E). Lack of laws and regulations regarding conservation. Only recently, on March 1992, Indonesian government had just passed a law on the conservation of Cultural Heritage ("Undang-Undang tentang benda cagar budaya").

Previously, we only have Monumenten Ordonantie Staatsblad 2381/1931, a product of Dutch governments, which had been outdated.

As a comparison, the number of historic preservation in the USA increased dramatically. In 1970 the number totalled 250 and today, 1995, there are more than 1000 historic preservation laws. Those ordinances are considered the most effective legal instruments for protecting landmark and historic district.

Little Nederlands Historic District

Based on a series of study by faculty of Engineering Diponegoro University since 1988, 101 old buildings are considered as having cultural significance, i.e. aesthetic, historic, scientific, or social value for past, present or future generations.

It means that the buildings are worth conserved. In 1992 the Mayor of Semarang

Issued a Decree, stating that all the 101 architectural heritage should be safeguarded against any drastic changes. Any modification, rehabilitation or renovation are not allowed without formal permission from the local municipality of Semarang. It was an excellent and brave step to ensure the existence of historic buildings and architecture of special interest in the city of Semarang.

The study also recommended the conservation of 3 historic districts : surrounding the Immanuel church in the old city center, surrounding the historic Young Monument (Tugu Muda), and surrounding the Elizabeth Hospital on the upper hill of Semarang.

The first mentioned historic district, popularly known as Little Netherlands, comprises more than half of the historic buildings in Semarang. Some of them are deteriorating due to lack of maintenance, but mostly are quite wellkept.

Therefore, despite all kinds of ‘cultural harassments’ and ‘architectural suicides’ happening in Indonesian big cities, we most of our colonial buildings in the old city centre of Semarang. The areas of Little Netherlands give a strong sense of place, which is very unique and almost impossible to find in other cities in Indonesia.

We have learned from our mistakes in the past (the disappearance of Alon-alon, the demolition of the first national railway station at Bubakan in the old city centre of Semarang, the destruction of nice colonial sugar factory at Pecinan, etc), and now we to conserve our Little Netherlands in Semarang amidst tremendous boom in development throughout its downtown.

Nicknames

A sign of hope come from citizen of Semarang themselves. The actual fact shows that they have great sense of belonging to old historic buildings or historic quarters. It can be easily identified by the way in which they gave unique nicknames for particular work of architecture and specific areas such as :

- “Office of Thousand Doors” (Lawang Sewu) for the railway office building having a lot of doors.
- “Dumed Church” (Gereja Blenduk) for a Catholic Immanuel church

with a big dome at the top.

- “Ghost House” (Rumah Setan) for a court of justice building believed to be place for issuing death penalty at colonial era.
- “Sugar House” (Gedung Gula) for a big factory building that produced sugar from sugar canes.
- “Stone House” (Gedung Batu) which is also known as Sam Poo Kong, for the ancient Chinese religious complex.
- “Mansion of Statay” (Gedung Sate) for government office that has a roof resembling a barbecue stick.

The buildings which have been given nick-names by the local people are historic buildings that are mostly remembered by and familiar to them. They functioned well as landmarks.

In some traditional and homogenous settlements, many old historic buildings and districts have been well conserved without any help from the government at all. It is a very fascinating kind of self conservation, based on the concept of gotong-royong (mutual self help).

The Constraints

With the dwindling budgets and growing deficits, the local government can no longer conduct conservation activities alone anymore.

We must be familiar with these financial problems since there are people who do not value architectural and historic qualities but who are concerned solely with the cost and profit of buildings or real estate and financial techniques that affect those costs and profits.

In order to save the old buildings in our city, we must aware of the art of negotiations and real estate transactions.

Actually, when done well, conservations can mean profit money for business and tax money for the local government. Instead of tearing old buildings down and start over, it might be more beneficial to restore what was already there. That is not say the job was easy.

At least, the community or the owner of buildings in the historic district had to make commitment before the private sector could be expected to finance the

conservation.

That commitments took to general directions. One was legislative, and the other consisted of various capital improvements in area (Biddle, J. 1976 :5).

Historic preservation or urban conservation in Semarang should be viewed as the best means of recovering the worth of past investments. By encouraging new business development within the existing Little Netherlands in the old city centre of Semarang, conservation can also spare the local government some of the cost of duplicating utilities and services in underdeveloped areas.

Planners and decision makers are beginning to realize that people often find greater contentment in the comfortable scale and friendly texture of restored historic districts than they do in the midst of contemporary new building that almost seem intended to make ordinary citizen feel unimportant.

The ambiance of old colonial times of Semarang can be easily felt by the scale of the building (no buildings extend more than 3 stories), the façade (ful of arches), the texture (exposed bricks and stones full of ornaments). It is not just aromatic Dutch colonial period which could be utilised as a source of inspiration for the design of new buildings. Old historic building should be seen as three-dimensional textbooks. This aspect has not been considered so far in the conservation of Little Netherlands.

The government can also assist historic districts by providing complementary amenities. In the area of Little Netherlands, it was proposed to provide trees, good street furniture, reconstruction of historic lamp posts, appropriate design for telephone box, etc. The city strategy of promoting such development will certainly give the Little Netherlands district a feeling of constant improvement and help inspire confidence in the future of the area. The new lightings at night also helps to create a safe and sound place as a red district area.

Recommendations

The entire area of Little Netherlands has no doubt contributed to the history of Semarang, functioned well as a sign of Dutch colonial era with spe-

cific identity, and should be strongly safeguarded as a historic district.

Being an important core in the old city centre, it is felt very urgent to free several roads within the area from heavy vehicular traffic or motor cars. Pedestrianisation of selected streets, particularly the main street in front of the Immanuel Church, should be introduced. Ornamented paving block are preferred, rather than dull asphalts. It is recommended to prepare calendar of cultural events to be conducted on the park and main streets, such as poetry reading, open air art exhibition, keroncong (traditional music) and Gambang Semarang performance, etc.

Outdoor café, souvenir kiosks and street vendors or hawkers are given the opportunity to flourish at particular time, to strengthen the area's sense of identity, full of tropical charm and informal ambiance.

Appropriate new features sensitively designed, based on authentic colonial forms, would help to further enhance the identity of the place.

For the sake of continuing evolution or sustainability of the area, new expressions of contemporary activities and needs will still be given room to develop, at vacant sites or at sites with architecturally poor quality buildings. It should be kept in mind that architecture is archeology of the future.

The involvement of the local governments, the private sectors, and the whole community, is badly needed to carry out conservation projects in Little Netherlands in accordance to specific planning and design guidelines for the area. If conservation is to mean anything, it must involve both the retaining of the old values held by the people and the changes or new developments to cater for the needs of modern society .

The campaign of conservation of Little Netherlands in Semarang, should be strengthened and followed with action oriented programs such as:

- education and training on architectural conservation, either in Indonesia or overseas.
- preparation of detailed planning and design guidelines supported by development control mechanism concerning the conservation of Little Netherlands historic districts, particularly relating to its architecture of significant cultural interest.

- the establishment of intersectoral body or institution with a specific task dealing with conservation matters.
- Finding ways to raise funds or financial assistance needed for conservation projects, based on mutual benefit participation or partnerships, both nationally and internationally.
- introduction of tax relief, transfer of development rights, and other incentives for the owners of old historic buildings in the Little Netherlands conservation area.

By utilizing the concept of public-private partnership and community participation, there will be a bright future for the Little Netherlands historic district, as an important part of Semarang's history.

REFERENCES

- Biddle, James. *Economic Benefits of Preserving Old Buildings*, National Trust For Historic Preservation, Washington, 1976.
- Budihardjo, Eko. *Inventarisasi Bangunan Kuno di Jawa Tengah*, Research report, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
- Budihardjo, Eko. *Konservasi Bangunan dan Lingkungan Bersejarah di Semarang*, Research report, Fakultas teknik Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.
- Budihardjo, Eko, and Sidharta. *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1989.
- Dobby, Alan. *Conservation and Planning*, Hutchinson of London, 1978.
- Murtagh, William J. *Keeping Time : The History and Theory of Preservation in America*, Sterling Publishing Co, New York, 1990.
- National Trust for Historic Preservation. *When Past Meets Future*, 45 National Preservation Conference, October 1991.

PELESTARIAN BANGUNAN INDIS DALAM MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN DI DIY (BAPPEDA DIY)

I. LATAR BELAKANG

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) harus lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, penerimaan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan yang beranekaragam.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah kunjungan wisata utama di Indonesia, dimana kepariwisataan di DIY menitik beratkan pada pengembangan wisata budaya termasuk tradisi, kesenian, peninggalan sejarah dan purbakala, disamping juga tidak mengurangi perhatiannya untuk pengembangan dan peningkatan obyek, atraksi dan jasa lain yang cukup potensial.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan predikat Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, Kota Gudeg, Kota Wisata serta Kota Budaya. Sebagai Kota Budaya, DIY mempunyai aset budaya peninggalan sejarah yang tidak ternilai harganya yaitu Candi Prambanan, Candi Sewu, dan candi lainnya yang tersebar di beberapa wilayah, serta Kraton dan bangunan sejarah lainnya berupa bangunan Indis, peninggalan masa penjajahan Belanda seperti, Benteng Vredeburg, Kantor Pos, Bank Negara Indonesia, Gedung Agung, Gedung DPRD Tingkat I, serta bangunan lain yang terletak pada kawasan kompleks Kota Baru, Kota Gede, Kawasan Malioboro.

Sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, dibidang pariwisata dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara Namun demikian peningkatan prosentasi secara kumulatif selama 4 (empat) tahun terakhir masih di bawah pertumbuhan

rata-rata (rendah), dan lama tinggal wisatawan di DIY tertera di bawah 2 (dua) hari. Hal tersebut merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di DIY.

Tantangan lain adalah terganggunya kelestarian obyek wisata budaya bangunan peninggalan sejarah khususnya bangunan Indis yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan pembangunan, mengakibatkan berkurangnya dan mungkin pula hilangnya aset obyek wisata budaya tersebut. Hilangnya obyek wisata budaya ini berpengaruh besar pada usaha di bidang kepariwisataan, sehingga sasaran pembangunan kepariwisataan sebagai sektor unggulan tidak dapat terpenuhi, disamping hilangnya bukti sejarah.

II. BUDAYA DAERAH SEBAGAI ASET WISATA DIY

Sebagai predikat Kota Budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai kekayaan benda cagar budaya yang merupakan salah satu obyek wisata budaya, tersebar di 5 (lima) Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya dan merupakan obyek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

Jumlah dan kunjungan wisatawan pada obyek wisata budaya sesuai pada tabel berikut:

NO	OBYEK WISATA	JML	TAHUN		
			1994	1995	1996
1.	Kraton	2	1.013.993	559.512	538.931
2	Candi	12	1.029.529	1.400.096	946.501
3.	Makam Raja	4	34.974	38.767	39.166
4.	Taman Sari	1	122.285	183.900	88.706
5.	Patilasan	7	209.757	212.042	210.102
6.	Cagar Budaya	7	583.340	691.171	661.449

Sumber : Statistik 1996 (Dinas Pariwisata DIY)

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Kraton, Candi, dan Cagar Budaya merupakan obyek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara.

III. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 (lima) tahun 1992, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah :

- a. Benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Istilah Bangunan Indis mengikuti sebutan yang digunakan untuk menangani kebudayaan Indis, yaitu wujud kebudayaan yang muncul sebagai percampuran antara kebudayaan local dan Eropa (Prof. Dr. Djoko Soekirman) sesuai dengan pasal 5 (lima) Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Bangunan tersebut termasuk katagori Benda Cagar Budaya untuk pantas mendapatkan perhatian.

Tantangan yang dihadapi dalam pelestarian bangunan Indis adalah terjadinya kerusakan akibat faktor alam dan manusia. Kerusakan karena faktor alam dapat disebabkan karena alam dan hayati, akibat iklim, bencana alam dan pengaruh hayati yang disebabkan karena tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kerusakan Benda Cagar Budaya dapat pula disebabkan karena ulah manusia yaitu berupa pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan Benda Cagar Budaya Bangunan Indis di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia dengan dilakukannya perubahan bentuk dan fungsi bangunan.

Perubahan bentuk bangunan dilakukan dengan kegiatan renovasi atau perombakan total dengan menghancurkan seluruh bangunan tersebut

disesuaikan dengan bentuk bangunan yang berlaku saat ini dan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi di luar sebelumnya dan atau berubah total dari fungsi semula.

Sebagai contoh terjadi perubahan fungsi dari rumah tinggal menjadi perkantoran, hotel, pertokoan, dan atau fungsi lain di luar fungsi sebelumnya, hal ini banyak dijumpai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

IV. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DIY

Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan jabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah memberikan arahan bahwa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI), pembangunan kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan, untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan pemasaran produk daerah, dan peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, kepariwisataan di DIY dititik beratkan pada pengembangan wisata budaya termasuk tradisi kesenian, peninggalan sejarah dan purbakala, disamping juga tidak mengurangi perhatian untuk pengembangan dan peningkatan obyek, aktraksi dan jenis wisata lain.

Upaya memberikan dukungan pelestarian benda –benda peninggalan sejarah dan purbakala perlu terus ditingkatkan, demikian juga pemasyarakatan benda sejarah dan purbakala sebagai obyek penelitian pendidikan dan kepariwisataan. Kesediaan masyarakat di dalam keterlibatan untuk pelestaria

dan pengamanan benda-benda sejarah dan purbakala sebagai kekayaan dan kebanggaan bangsa terus ditumbuhkan dan dikembangkan, dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Peninggalan sejarah dan permuseuman merupakan lingkup kebijaksanaan dalam upaya pelestarian tradisi dan peninggalan sejarah, termasuk kawasan cagar budaya yang mempunyai nilai-nilai perjuangan bangsa. Pelestarian dilakukan pula dengan pengamanan dan perlindungan benda cagar budaya dari kemungkinan kerusakan dan lain-lain.

V. RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penataan ruang seperti tercantum pada Pasal 1 UU No. 24 Tahun 1992 dalam arti proses perencanaan, pemanfaatann dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sesuai dengan Perda No. 5 tahun 1992 sebagai matra ruang pembangunan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya sehingga tidak terdapat pergeseran atau alih fungsi sesuai dengan arahan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut. Arahan kegiatan pada rencana Tata Ruang ini termasuk di dalam arahan kegiatan pada kawasan lindung serta kawasan cagar budaya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) DIY telah dijabarkan pada Daerah Tingkat II, Kabupaten, maupun Kota menjadi Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Dati II, 5 (lima) Daerah Tingkat II Kabupaten / Kota telah menyelesaikan rencana Tata Ruang Wilayahnya sebagai dasar untuk pemberian ijin, baik ijin prinsip maupun ijin lokasi. Beberapa Dati II khususnya Kota Yogyakarta yang merupakan lokasi utama bangunan-bangunan Indis telah melakukan penyusunan tata ruang kawasan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi bangunan-bangunan Indis dalam upaya mendukung pelestarian cagar budaya peninggalan sejarah.

Kegiatan lain telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya menindak lanjuti Perda No. 7 Tahun 1986 tentang penetapan kawasan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni kawasan cagar budaya Kraton, Puro Pakualaman dan Kota Gede yang terletak

di kawasan Kota Yogyakarta, Kawasan cagar budaya Ambar Ketawang dan Prambanan di daerah Tingkat II Sleman serta kawasan cagar budaya Parangtritis dan Ambar Binangun di daerah Tingkat II Bantul. Sebagaiantisipasi terhadap dampak negatif yang disebabkan oleh aktifitas pembangunan maka dalam pembangunan jangka panjang tahap ke dua (PJP II) dirumuskan tentang asas pembangunan berwawasan pada keaslian, keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan manusia-manusia, manusia-masyarakat, manusia-lingkungan dan manusia-Tuhan Yang Maha Esa.

VI. PENUTUP

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, Kota Gudeg, dan Kota Budaya menetapkan sebagai daerah tujuan wisata utama sehingga sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang ditetapkan dengan andalan wisata budaya dikarenakan Yogyakarta terdapat obyek wisata peninggalan sejarah., dari masa prasejarah hingga masa revolusi banyak ditemukan di wilayah ini.

Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Gebang, Candi Ijo, dan candi-candi lainnya seperti Candi Morangan, Kraton, Puro Pakualaman, Taman Sari, Kaliurang, Gedung Agung, Gedung DPRD, Senisono, Societiet Militiare, Kota Gede, Kota Baru, merupakan suatu obyek peninggalan sejarah, peninggalan budaya baik masa prasejarah maupun masa revolusi. Bangunan-bangunan tersebut melambangkan budaya daerah di DIY, sebagai benda cagar budaya merupakan daya tarik wisata tersendiri.

Namun demikian adanya kegiatan pembangunan dan kekurang-sadaran masyarakat akan pelestariannya, banyak melakukan perubahan-perubahan sehingga menimbulkan gangguan pelestarian budaya daerah dan berkurangnya obyek wisata budaya. Menyadari akan hal tersebut upaya pelestarian budaya daerah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya termasuk di dalamnya bangunan-bangunan Indis dilakukan dengan adanya instrumen pengendalian baik dalam upaya pembinaan, pemeliharaan serta pemanfaatannya.

Pemanfaatan bangunan yang terletak dalam satu kawasan harus mengacu pada arahan yang terletak pada Rencana Tata Ruang Daerah khususnya Rencana Tata Ruang Kawasan. Pembinaan pelestarian cagar budaya termasuk bangunan Indis dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986, di samping itu pembinaan kepada masyarakat tentang pemanfaatan bangunan Indis untuk tetap dilestarikan baik dari bentuk maupun fungsinya.

Kebijaksanaan pembangunan yang memperhatikan pada pelestarian, keserasian dan kesinambungan bagi bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dalam arti bangunan yang telah mempunyai umur lebih dari 50 tahun khususnya bangunan Indis, harus mengacu pada Pola Dasar dan Repelita Daerah agar budaya daerah sebagai obyek wisata budaya dapat dimanfaatkan dalam mendukung kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BANGUNAN INDIS DALAM PERSPEKTIF PARIWISATA (DINAS PARIWISATA PROP. DIY)

Kebijaksanaan Dasar Pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian serta pendayaan warisan budaya, termasuk benda-benda peninggalan sejarah/purbakala, dapat ditemukan dalam GBHN Tahun 1993 :

“Nilai, tradisi, dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa, serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kejuangan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional perlu terus digali, dipelihara, serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air. Perencanaan tata ruang disemua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah dan rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan, menjaga dan memelihara dan pengawetan serta mempertahankan warisan budaya tersebut.

Propinsi Jawa Tengah dan DIY merupakan daerah-daerah yang kaya akan monumen dan peninggalan bersejarah. Banyak sekali candi yang terkenal dari jaman Klasik menurut sejarah Jawa, Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko misalnya : merupakan adikarya (master piece) yang unik. Sesungguhnya Propinsi ini masih mempunyai banyak peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan, atau dengan kata lain, peninggalan sejarah dapat didaya gunakan sebagai aset wisata.

Peninggalan sejarah/purbakala pada dasarnya dapat dibedakan dalam berbagai jenis kreteria antara lain:

Yang berhubungan dengan jaman Klasik (Hindu):

*candi abad VII s.d abad XV

Yang berhubungan dengan tradisi Islam:

*mesjid, Kraton abad XV hingga sekarang

Yang berhubungan dengan jaman kolonial:

*abad ke XVIII s.d awal abad XX

Semua warisan budaya ini mampu mengisahkan beberapa bagian perjalanan sejarah menuju Indonesia yang modern

Pesona warisan budaya harus menciptakan keseimbangan antara dua pilihan yang sangat berbeda: perlunya warisan itu dilestarikan dan mendesaknya kebutuhan publik/wisatawan untuk dapat menikmatinya.

Dengan mengacu kriteria tersebut di atas, maka bangunan Indis (peninggalan Kolonial) dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya, dimana keberadaannya perlu dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, kepariwisataan maupun kegiatan seni/budaya. Di negara kita Undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap warisan yang bernilai Arkeologi masih bertumpu pada "Monumental Ordonantie, Stbl. No. 238, 1931" dan masih berlaku sampai sekarang dalam Undang-undang tersebut digariskan:

- Benda-benda buatan tangan manusia yang tidak atau dapat dipindahkan sebagian atau sekelompok harta milik atau benda-benda peninggalan, terutama yang berumur 50 tahun dan dianggap penting dalam pra sejarah, sejarah atau seni.
- Benda-benda yang punya arti penting menurut pandangan palaeo atpology.
- Tempat-tempat yang mempunyai cukup indikasi yang terbukti merupakan peninggalan yang bernilai sejarah dan Arkeologis dan sudah dicatat dalam Daftar Monumen Negara oleh Lembaga Arkeologi

Upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya telah banyak dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada perundangan khusus yang mengatur perlindungan dan pengawetan terhadap bangunan-bangunan yang bersejarah dan bernilai arkeologis khususnya di Propinsi Jawa Tengah dan DIY.

Peraturan-peraturan yang ada hanya berasal dari Instruksi Gubernur

yang mengacu kepada Monomental Ordonatie, 1931.

Salah satu contoh adalah Instruksi Gubernur Jawa Tengah yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang memerintahkan agar:

1. Mengadakan koordinasi dengan Kanwil Depdikbud dimasing-masing daerah;
2. Mendukung Depdikbud dalam upaya menjaga warisan budaya
3. Mengawasi dan mengatur dan mengatur penggunaan tanah guna menghindari terjadinya polusi setempat atau di daerah sekitar lokasi Arkeologi pada zone 50 – 200 meter;
4. Melarang penggalian, penghancuran yang berada di lokasi arkeologis., pemindahan benda-benda warisan budaya.

Kebijakan-kebijakan dasar dan perundangan tersebut di atas memberikan gambaran, kepada kita tentang sudah berjalannya upaya perlindungan terhadap beda-benda warisan budaya, tetapi banyak bangunan arsitektur dari jaman kolonial di Kota Yogyakarta dan Semarang, belum terlindungi.

Dengan demikian sangat diperlukan adanya pendataan dan pendaftaran semua bangunan penting, termasuk bangunan Indis yang terancam dampak negatif pembangunan.

Bangunan-bangunan bersejarah yang dikuasai oleh pemilik atau pemakai tanpa ada kesadaran mengenai nilai historisnya mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehancuran dan kehilangan nilainya sebagai monumen atau tempat bersejarah. Hal ini karena pemilik atau pemakainya tidak menyadari nilai sejarah yang ada pada bangunan tersebut, atau ada kepentingan yang mendesak. Peranan dari Dinas dan Kanwil Depdikbud, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Arkeologi, dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, serta Kanwil DEPPARPOSTEL dan Dinas Pariwisata sangat diharapkan secara koordinasi.

Melihat akan arti pentingnya benda cagar budaya bagi kepentingan pendidikan, budaya, dan kepariwisataan diperlukan adanya toleransi yang cukup besar dalam menerapkan metode arkeologi pada saat melakukan restorasi pada monomen-monumen hidup (bangunan yang masih dipakai sesuai dengan tujuan semula). Faktor manfaat dan tujuan menghidupkan fungsi

monumen memainkan peran penting yang tidak dapat dielakkan.

Jika sebuah monumen hidup (termasuk bangunan Indis) tidak ada kemungkinan mengubah semua fungsi bangunan yang ada menjadi Museum atau Pusat Kebudayaan, alternatif lain adalah memanfaatkannya menjadi Hotel atau Penginapan. Sebagai contoh :Hotel Natour Garuda Yogyakarta, Gedung Agung, Benteng Vredeburg, Gedung Societeit Militaire. Dengan demikian keberadaan bangunan Indis pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kepentingan kepariwisataan. Oleh karena itu keberadaannya perlu dilestarikan melalui upaya pemugaran atau restorasi.

Pemanfaatan bangunan Indis sebagai sarana wisata menunjukkan bahwa keberadaannya dapat didaya gunakan sebagai aset yang bernilai ekonomis yang tinggi. Lebih jauh bangunan tersebut juga merupakan aset budaya.

Dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata budaya bangunan Indis termasuk komoditas yang harus dipelihara dan dilestarikan, karena merupakan modal untuk mendukung kegiatan pariwisata budaya tersebut.

Sebagai daerah tujuan wisata budaya Yogyakarta kaya akan potensi peninggalan sejarah/purbakala serta bangunan-bangunan peninggalan Hindia Belanda. Faktor-faktor budaya inilah yang menjadi obyek andalan Yogyakarta dan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Dengan demikian sangatlah tepat apabila di Yogyakarta dikembangkan program kegiatan wisata budaya guna melestarikan segala potensi yang ada.

Sedangkan manfaat yang lebih luas yang dapat diambil dari adanya pelestarian cagar budaya adalah untuk mendukung kegiatan wisata remaja dan pemuda, dalam bentuk kunjungan ke obyek-obyek wisata budaya maupun pembinaan generasi muda dalam hal ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta membentuk mental/kepribadian mereka. Dengan adanya pelestarian bangunan Indis kiranya ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain :

A. Dipandang dari aspek sejarah

Bangunan peninggalan baik berujud kota, lingkungan, tata ruang luar, bangunan gedung dan lain sebagainya dapat menjadi gambaran nyata yang

berharga bagi generasi mendatang, sebagai bekal mengembangkan diri. Pemugaran dan pelestarian suatu bangunan dapat bertujuan untuk menggambarkan kenyataan yang ada pada masa lalu, sehingga generasi sekarang dapat memperoleh informasi semaksimal mungkin. Lingkup pemugaran dapat didasarkan pada ukuran atau skala dan type. Ukuran dapat menunjukkan luasnya jangkauan bangunan (kota, lingkungan); skala dapat menunjukkan kekuasaan penguasa pada masa lalu, yang dicerminkan melalui perwujudan kewibawaan gedung dan sekitarnya ; type menunjukkan peran, atau pengaruh kehidupan kekuasaan yang turun temurun.

B. Dipandang dari aspek budaya.

Bangunan peninggalan sejarah dapat memberikan gambaran tentang pola kehidupan masyarakat pada waktu itu yang dicerminkan melalui tata ruang, yang memperlihatkan kegiatan kemasyarakatan dengan segala kebutuhan fisiknya. Atau memberikan gambaran tentang kebiasaan hidup individu maupun masyarakat (kebudayaan), melalui pencerminan kegiatan sosial budaya masyarakat pada waktu itu. Peninggalan tersebut dapat berbicara tentang sikap dan tingkah laku, nilai keindahan, tarap kehidupan, selera, kepentingan, nilai jangkauan perspektif pemikiran, konsekuensi gerak kemasyarakatan dan perilaku kemajuan masyarakat dalam bidang industri.

C. Dipandang dari aspek fungsi dan social ekonomi

Bangunan peninggalan dapat memberikan informasi tentang kebutuhan atau tingkat sosial ekonomi masyarakat atau penguasa atau individu pada waktu itu. Demikian pula dapat dilihat taraf sosial ekonominya, antara lain dengan lengkapnya fasilitas atau banyaknya variasi yang terlihat, atau lengkapnya bahan-bahan pendukung baik bahan jadi maupun harus diupayakan pengadaannya.

Berbagai manfaat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa keberadaan bangunan cagar budaya sangat dibutuhkan, baik dalam rangka pengembangan kepariwisataan maupun pendidikan generasi muda.

Dengan demikian bagi dunia pariwisata akan sangat berguna apabila keberadaan bangunan Indis dan cagar budaya pada umumnya dapat dilestarikan, melalui koordinasi dan peran serta dengan pihak-pihak yang terkait.

KELESTARIAN DAN PELESTARIAN BANGUNAN INDIS STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG

(Uka Tjadradasmitra)

Pada kesempatan yang amat baik ini terlebih dahulu kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia seminar yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyumbangkan sedikit pemikiran dalam upaya pelestarian bangunan Indis sesuai dengan makalah yang telah diberikan panitia. Pembicaraan yang akan kami sampaikan sekitar upaya kelestarian dan pelestarian bangunan-bangunan Indis yang terutama berada di Kota Semarang. Hal ini ada hubungan dengan penelitian yang pernah kami lakukan tahun 1991-1992 ketika menjadi salah seorang anggota konsultan dalam kegiatan Project UNESCO/UNDP directorate General Tourism tentang Cultural Tourism Development Central Java Yogyakarta.

Tidak dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat kita terhadap peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat digolongkan kepada Benda Cagar Budaya belum memberikan perhatian sepenuhnya sebagaimana kita harapkan. Lebih-lebih terhadap peninggalan bangunan Indis hasil jalinan antara budaya Belanda/Barat dengan budaya Indonesia yang jelas mempunyai nilai penting bagi sejarah. Kebudayaan Barat/Belanda dengan budaya Indonesia. Dr. Djoko Soekiman menyatakan dengan jelas bahwa "Kebudayaan Indis adalah monumen estetis hasil budaya binaan (Cultural Construct) dan imajinasi koleksi, serta ekspresi kreatif sekelompok masyarakat di Hindia Belanda yang menggunakan dasar budaya Belanda dan Indonesia (Djoko Soekiman, 1996). Kurangnya penghargaan atau perhatian dalam penilaian masyarakat pada umumnya terhadap bangunan Indis merupakan wujud bangunan yang mengingatkan kepada sifat-sifat kolonial Belanda masa lampau. Lebih-lebih apabila disebut dengan istilah "bangunan Kolonial" mungkin akan memberikan dampak yang bertambah kurangnya perhatian dan penghargaan masyarakat awam terhadapnya. Bahkan beberapa tahun yang lampau kami mendapatkan pengalaman ada yang mempertanyakan kenapa benteng kolonial harus

dipelihara dan dilindungi undang-undang?. Pertanyaan ini bukankah memberikan gambaran kepada kita adanya ketidakfahaman atau ketidaksadaran historis/ arkeologi dari seorang pejabat pemerintah.

Kecuali faktor psikologi-politis dan masyarakat umum yang berakibat kurangnya perhatian terhadap peninggalan yang berupa bangunan Indis tersebut juga ada beberapa faktor lainnya yang bukan hanya berakibat terlantarnya bangunan-bangunan Indis, tetapi juga kecenderungan untuk dirombak dan diganti oleh bangunan-bangunan modern yang lebih berfungsi kemersial. Kecenderungan yang terakhir ini mungkin sekali ada hubungannya dengan faktor yang lebih menitikberatkan kepada fungsi ekonomis misalnya untuk supermarket, mall dll. Memang gejala semacam ini beberapa kota besar di Tanah Air kita di mana terdapat banyak bangunan-bangunan Indis. Hal seperti ini juga pernah terjadi di Kota-Kota Negara-Negara berkembang sebagai eksekusi atau dampak negatif dari pembangunan. Menurut Hanna Saba Babn asitennya Nabil G. Selama yang telah mempersiapkan "Compendium of legislative texts" untuk UNESCO mengatakan bahwa yang mengancam kerusakan atau kemusnahan benda cagar budaya bermacam-macam. Di antaranya bahaya yang timbul karena pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, karena perkembangan ekonomi dan industri (Unesco, 1984:15).

Dewasa ini kita memaklumi adanya beberapa puluh bangunan Indis yang sudah hilang dari tempatnya dan beberapa puluh yang keadaannya terlantar dan kecenderungannya untuk dimusnahkan kemudian diganti oleh bangunan masa kini seperti diketahui di beberapa kota besar di Jakarta, di Ujung Pandang, di Bandung, di Surabaya, di Semarang, dan kota-kota lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kita baca tentang bangunan Indis berupa landhuizen Gunung Sari, Citrap (Citeureup), Tanjung Oost dan lainnya yang pernah ditulis V.I van de Wall : *Indische Landhuizen en Hun Geschiedenis*: yang diterbitkan Kon. Bat genootschap van Kunsten en Wetenscappe, Batavia 1932, kita akan melihat kenyataannya bahwa bangunan-bangunan tersebut kondisinya waktu itu jauh berbeda dari masa dahulu yaitu kurang terawat mengalami kerusakan. Kecuali bangunan bekas Renier Kerk yang masih terpelihara betul karena difungsikan tempat arsip nasional. Hotel Des Indis dan gedung Societeit de Harmoni seperti terlihat pada gambar-gambar

lama sejak beberapa tahun lalu sudah berubah menjadi tempat perbelanjaan . meskipun upaya perlindungan dan upaya hukum yang melindunginya pada waktu itu sudah ada. Di Ujung Pandang sebuah kota besar di luar Jawa juga mengalami perombakan dan kehilangan bangunan Indis antara lain gedung pelni bekas Maatschappij Pelayaran, gedung bank Pembangunan Daerah dulunya Javanische Bank, atau penjara , societet de Harmoni dan lainnya.

Di samping kami kira sudah ada beberapa bangunan Indis mengalami perombakan dan penggusuran karena kepentingan lainnya seperti bekas Rumah Sakit militer. Bangunan bersejarah di Pasar Johar sudah berubah menjadi hotel dan toko-toko besar. Dalam situasi dan kondisi yang mengancam kepunahan bangunan-bangunan Indis di kota Semarang sejak beberapa tahun lampau muncul usaha terpuji dari Pemda tingkat II Kodya Semarang yang telah membentuk Tim untuk mengadakan inventarisasi serta penelitian bangunan Indis yang bernilai sejarah dan budaya tinggi. Tugas tersebut diserahkan oleh BAPPEDA melalui anggaran tahun 1987-1988 kepada P. T Raka Citra dengan pelaksana penelitiannya dilakukan oleh sebuah Tim dibawah koordinasi Prof. Ir Sidharta. Dari laporannya yang berjudul “Konservasi bangunan dan Lingkungan Kotamadya Dati II Semarang “ tahun 1998 dalam bentuk ketikan kita akan mendapatkan gambaran yang cukup lengkap sebagai awal upaya menginventarisasikan, menganalisa , dan merumuskan , mengkategorikan bangunan –bangunan kuno guna penanganan konservasi. Yang menarik perhatian kita bahwa penelitian bangunan kuno tersebut telah dihubungkan dengan masalah lingkungannya bahkan dengan kaitan konsep konservasi kota bersejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya itu sesuai pula dengan berbagai aspek kota: Kemasyarakatannya, kependudukan, lingkungan, Kebudayaannya, Perekonomian, Politik dan lainnya. Oleh karena itu pula tak mengherankan jika apa yang disebut kota oleh para ahli diberikan definisi berdasarkan bidang keilmuannya masing-masing. Jadi ada definifsi kota dipandang dari sudut sosiologi, demografi, ekonomi, ekologi, dan lainnya (Uka Tjandrasmita dalam makalah “The Consept of Ancient Cities in Southheast Asia and Their Protection “ 1991/1992: 1-3).

Bangunan-bangunan kuno di kota Semarang di mana banyak bangunan Indis yang telah diinventarisasi, diteliti, dan dianalisis untuk upaya

konservasi, restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, adaptasi dan lainnya. Oleh Tim peneliti yang dikoordinir oleh prof. Ir. Eko Budiharjo lebih kurang 99 bangunan kuno itu telah ditentukan kriteria untuk penanganan konservasi selanjutnya dengan cara pembobotan berdasarkan tolok ukur estetika/arsitektonis, kejamakan/tipikal, kelangkaan, peran sejarah, pengaruh terhadap lingkungan, dan keistimewaan, Penilaian dari ukur fisik tersebut ditambah dengan tolok ukur non-fisik berupa nilai sosial budaya, komersial dan pengembangan ilmu. Kecuali itu ditambahkan pula penilaian dari segi tata-ruang luar, bentuk bangunan, struktur/konstruksi, interior, dan ornamen (BAPPEDA, 1988: IV-7). Setelah dilakukan dengan pembobotan dengan tolok ukur tersebut, maka sampailah pada hasil penentuan peringkat dan prioritas untuk menangani konservasinya. Bangunan-bangunan yang berjumlah 99 itu dikelompokkan sebagai bangunan pendidikan, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, peribadatan, rumah tinggal dan asrama, rumah sakit, penginapan, dan bangunan lainnya.

Bangunan-bangunan tersebut di atas ada yang diberi peringkat I sampai III serta prioritas untuk penanganan : daftar BAPPEDA, 19988 : IV-8-13). Dari hasil pembobotan dengan metode Delphi dapat diketahui bahwa bangunan yang mempunyai nilai no : 2 yaitu 66 dan gedung nomor 3 yang bernilai 59 ialah rumah di Jln. Teuku Umar.

Hasil penelitian tersebut juga menentukan kawasan atau daerah konservasi yaitu atas 3 kawasan : kawasan pusat kota lama, dengan tenggeran utama Gereja Bleduk, kawasan sekitar Tugu pemuda dengan tenger utama gedung lawang sewu, dan kawasan candi baru dengan tenggeran utama eks rumah Walikota. Diharapkan ketiga bangunan tersebut di Cagar-budayakan sebagai daerah konservasi yaitu tidak hanya bangunan saja tetapi juga ruang terbukanya . Bangunan Indis yang terletak di kawasan Candi rupa-rupanya hasil karya hasil karya ternama R. Thomas Karsen dalam tahun 1916-1919 yang sebenarnya sejak tahun 1966 direncanakan sejak tahun 1906 direncanakan oleh pemerintah setempat pada waktu itu. Ditempat dataran tinggi yaitu di kawasan Candi oleh Karsten diperuntukan terutama perumahan orang-orang Eropa dan Cina dan di daerah yang lebih rendah bagi penguasa setempat serta perkampungan pribumi. Denah (lay aut) tersebut mengakomodasikan

bangunan-bangunan, jalan-jalan, taman-taman yang disesuaikan dengan kontur tanah yang ilmiah. Demikian pula pandangan yang indah dari kawasan Candi ini ke kota bagian bawah dengan posisinya amat diperhatikan. Karena pekerjaannya itu Ir. Karsten dipuji antara lain oleh Eric Bogaers dan Peter de Ruijter yang mengatakan bahwa “the work of karten was of great importance to the development of town planning and housing in the Dutch East Indies in the first half of this century, particularly 1915-1940” (Eric Bogaers and Peter de Ruijter dalam *The Indonesian City* (Editor Peter J.M. Nas, 1986:71-88)). Oleh karena itu dari usia bangunan Indis yang ada di kawasan Candi jelas lebih muda dari yang terdapat di daerah kota yang lebih rendah apalagi yang terdapat di kota lama Semarang. Meskipun dengan demikian karena usia serta nilai masuk kepada benda cagar budaya maka tetap diperlukan pelestariannya.

Dari deskripsi bangunan-bangunan hasil inventarisasi di kota Semarang pada tahun 1988 itu dan yang tahun 1991 kami survey juga ternyata beberapa bangunan Indis dari kelestarian sejak awalnya sudah mengalami perubahan. Di antaranya Lawang Sewu sudah mendapat tambahan bagian-bagian depan di bongkar ditambah bangunan sederhana untuk pos penjagaan dan garasi. Gedung Bank Niaga sudah mengalami beberapa perubahan di bagian dalam disesuaikan dengan fungsinya sekarang, Gedung Bank Niaga yang berada dekat gereja Blenduk sudah mengalami beberapa perubahan pada serambi belakang, pintu masuk samping, perubahan pada dinding sekat-sekatan, ruang kerja langit-langitnya diturunkan dan beberapa perubahan pada bagian yang lainnya. Gedung kantor Pos Besar di Jln. Letjen Suprpto telah mengalami beberapa perubahan sejak pemugaran tahun 1979 dengan penambahan ruang-ruang di bagian belakang. Gereja St. Joseph dan pastoran di Jln. Ronggowarsito juga sejak ada pemugaran tahun 1976 telah mengalami perubahan lantai plester koornya ditinggikan dan bagian-bagian kecilnya, Gedung Marba di Jln. Letjen Suprpto keadaannya tidak terawat dan mengalami kerusakan. Rumah dinas Gubernur walau sedikit-sedikit sudah mengalami perubahan dan di belakangnya didirikan bangunan tinggi bertingkat dijadikan APDN sejak tahun 1978. Demikian cukuplah contoh-contoh bangunan-bangunan Indis di kota Semarang yang mengalami perubahan dari

kelestarian semula.

Dari contoh bangunan –bangunan Indis yang mengalami perubahan dan juga yang tidak terawat maka upaya pelestarian yang diawali inventarisasi dan penelitiannya terutama tahun 1988 dan kemudian diteliti lagi pada tahun 1991 oleh kami sendiri sebagai anggota Konsultan Project UNESCO/UNDP yang ditugasi untuk meneliti Old City Semarang dalam rangka upaya pengembangan Cultural Torism di Jawa Tengah dan Yogyakarta, amatlah penting. Yang dilakukan pada tahun –tahun lalu itu karena belum mendengar terutama dari pihak pemerintah daerah dan dari masyarakatnya. Jika masih ada kenyataan kurangnya perhatian akan usaha-usaha pelestarian serta lebih lagi kalau masih ada perombakan dan pemusnaan bangunan-bangunan Indis maupun yang bukan Indis maka langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan?.

Dalam laporan hasil inventarisasi dan penelitian yang dilakukan BAPEDA di bawah koodinasi Prof. Ir Eko Budiharjo landasan hukum nasional dan daerah sudah dipakai serta sistem iventarisasi dan kriteria pembobotan, pemberian prioritas yang diusulkan sudah cukup jelas. Demikian pula dalam laporan kami tahun 191 tentang Old City of Semarang disertai pula usul tindakan kelanjutan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan apa telah diusulkan TIM Prof. Ir. Eko Budiharjo. Pada kesempatan ini kami perlu menegaskan lagi langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan yang juga mungkin berlaku di daerah lainnya termasuk DIY. Karena dalam laporan perlindungan dan konservasi tahun 1991 bagi cultural tourism Delevoment Central Java Yogyakarta kami tujukan untuk kedua daerah tersebut (Uka Tjandrasmita : Avtivity Report No.6). Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Dibentuk suatu Tim koordinasi antar instansi di tingkat daerah untuk membicarakan berbagai langkah yang akan dilakukan;
2. Setelah Tim terbentuk apakah di bawah koordinasi pemerintah daerah atau instansi lainnya yang kompeten, maka diprogramkan langkah-langkah yang dilakukan dan perlu dijelaskan lebih dahulu pada pemilik atau yang menguasai bangunan-bangunan Indis yang akan diinventarisasi, diteliti kondisinya untuk upaya pelestarian dan pemanfaatannya.

3. Dalam pertemuan antara Tim dengan pemilik atau yang menguasai perlu di jelaskan dahulu tujuan diinventarisasi dan akan dikukuhkannya bangunan yang dimilikinya sebagai benda cagar budaya. Berikan pengertian nilai-nilai historis, budaya dan ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan kepentingan bagi pemupukan jiwa dan kepribadian budaya bangsa. Penjelasan-penjelasan yang tercantum pada beberapa pasal pada UU no. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya PP No. 10 tahun 1933 serta kepmen-kepmen, juklak-juklaknya, perlu diterangkan secara komprehensif. Dalam menjelaskan Pasal-pasal yang relevan itu perlu dikaitkan dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan lainnya bahkan dengan apa yang telah diterbitkan oleh daerahnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1992 dan PP No. 10 tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya itu. Bahkan untuk memberikan gambaran kompensasi bangunan dijadikan benda cagar budaya dapat ditunjuk UU no. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya Pasal 3 ayat (1) b, yaitu objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Setelah cukup diberikan penjelasan-penjelasan mereka pemilik maupun yang menguasai bangunan yang kemungkinan akan dijadikan Benda Cagar Budaya maka baru melangkah kepada pelaksanaan- pelaksanaan teknis:
 - a. Melakukan inventerisasi dan dokumentasi yang teliti meliputi berbagai aspek termasuk status pemilikan atau penguasaannya
 - b. Untuk melakukan butir a tersebut di atas diperlukan ahli-ahli sejarah, arkeologi, teknologi, planologi, hukum, ekonomi, ekologi dan lainnya yang ada relevansinya;
 - c. Setelah dilakukan butir a dan b maka langkah berikutnya dibuat daftar dengan deskripsi lengkap yang selanjutnya diusulkan dengan dua cara : untuk cepatnya ditujukan kepada gubernur agar berdasarkan PERDA menerbitkan surat keputusan bangunan-bangunan yang mempunyai nilai penting sesuai dengan UU n0. 5 Tahun 1992, ditetapkan sebagai Benda cagar Budaya ; selanjutnya diusulkan kepada Mendikbud sesuai UU. 5 Tahun 1992 untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar budaya.

- d. Langkah selanjutnya melakukan upaya pelestarian melalui perlindungan hukum jika telah diterbitkan surat keputusannya baik oleh gubernur untuk sementara lebih-lebih jika sudah SK Mendikbud. Pelestarian melalui preservasi, konservasi, restorasi, adaptasi, rehabilitasi, konsolidasi dan lainnya sesuai dengan pengertian yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman-pedoman teknis bahkan mungkin sudah diaplikasikan diambil dari piagam-piagam Internasional seperti ICOMOS Charter, Burra Charter dll.
5. Untuk melaksanakan apa yang tercantum pada butir d terutama konservasi, restorasi memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu di daerah perlu dibentuk suatu badan apakah itu swasta maupun pemerintah yang berfungsi pencari/pengumpul dan yang sekaligus berfungsi sebagai pelestari dan pembina bangunan-bangunan termasuk benda Cagar Budaya yang membantu pemerintah. Badan itu berfungsi sebagai trust mungkin ada satu yayasan pelestari budaya bangsa.
6. Baik Tim maupaun badan yang semacam dengan Trust di daerah selalu berhubungan dengan kantor Suaka Peningalan Sejarah Purbakala / kantor Wilayah Depdikbud setempat, BALAR yang mempunyai tugas yang berhubungan Benda Cagar Budaya . Bahkan IAAI mungkin sebaiknya turut aktif dalam trust dimaksudkan. Mengingat di Kota Semarang banyak bangunan indis yang ditempati perusahaan swasta maka mungkin dapat diharapkan salah seorang dari pemimpnnya diajak berpartisipasi aktif dalam Trust tersebut.

Demikian sumbangan fikiran kami dalam rangka upaya pelestarian bangunan-bangunan benda Cagar Budaya dan khususnya bangunan-bangunan Indis yang perlu dicagar budayakan baik yang berada di kota Semarang di tempat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.

DAFTAR BACAAN

- BAPPEDA Kodaya Dati Semarang : Konservasi Bangunan dan Lingkungan Kotamadya dati II Semarang, BAPPEDA, 1988
- Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis dan gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII sampai medio abad XX), Yogyakarta, 1996.
- Erica Bogaes and Peter de stujeer,” Ir. Thomas Karten and Indonesiaan Town Planning 1915-1940 The Indoneisan City Studies in Urban development and Planinng, Edited by Peter J.M. Nas, V Colkekunde van Het Kon. Inst. Voor T. L. en Volkkekunde, Foris Publicatioan Dordecht –Holland/Ciinnaminson –USA, 1986, hlm. 71-88.
- Hanna saba and Nabil G. Salame, The Protetion of movable cullltural Property Compendium of Legislative Texts. Unesco, 1984.
- Uka Tjandrasasmita, “Propection and Conservration of Cultural Heritage for Tourism Develoment”, Activity Report no. 6, directorate General Tourism UNESCO/UNDP, 1991-1992.
- “Oled city Semarang”, Activity report No.2, directorate General Tourism UNESCO/UNDP,1991-1992.
- “the Concept of Ancient Ciities in Southeast Asia and their protection” dalam Laporan Pelaksanaan SPAFA training Course on Conserva-tion of ancient cCitis and/ on Settlements Banten –Borobudur Trowulan, Jakarta 18 Mei 29 Juni 1991. Depdikbud. Dirjen Kebudayyan , Proyek pelestarian /Pemanfatan Peningggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta,1991/1992.
- Wall. V.i.dan de , Indische landhulzen en Hun geschiedenis, Kon . Bat Gen, van kunsten en Watenschappen, Batavia, 1932

Undang-Undang dan Peraturan lain :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
PP no. 10 tahun 1992 tentang Pelaksanaan UU no. 55 tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.

Kepmen-Kepmen dan Juklak-Jklaknya.

UU no. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

UU no. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan –peraturan yang ditentukan oleh pemerintah dari Jawa
tengah dan D.I Yogyakarta.

ICOMOS Chater, 1964; Burra Charter , 1983.

BANGUNAN-BANGUNAN INDIS DI YOGYAKARTA

Tinjauan kelestarian dan pelestarian

(*Bambang Prasetya, Wahyuhono, Tri Hartono*)

I. Pendahuluan

Penyebutan Bangunan Indis di Indonesia digunakan untuk menyebut bangunan-bangunan yang bercorak Eropa/Barat. Corak bangunan ini dibawa di Indonesia oleh orang-orang belanda, Portugis dan Inggris sewaktu mereka menjajah kepulauan ini. Pengertian Indis itu sendiri diambil dari istilah kolonialisme yang biasa digunakan untuk menyebut hasil kebudayaan imaterial. Pengertian ini diadopsi untuk menyebut bangunan Eropa yang beradaptasi dengan corak bangunan lokal (Soekiman, 1996). Dari uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa bangunan peninggalan kolonial yang mencerminkan budaya imaterial.

Perkembangan di beberapa daerah di Indonesia berkembang dalam kurun waktu yang berbeda. Hal ini tergantung perkembangan Politik masa lalu di suatu daerah. Di DIY, bangunan Indis berkembang hampir bersamaan dengan perkembangan kota Yogyakarta. Bangunan –bangunan ini semakin berkembang pada saat penempatan asisten Residen di beberapa daerah di wilayah daerah tersebut., seperti Gunung kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kalasan.

Sampai saat ini secara kebetulan tinggalan bangunan Indis di DIY, banyak ditemukan di kotamadya Yogyakarta. Mengingat bangunan Indis di kota ini mempunyai berbagai jenis dan dapat mewakili bangunan-bangunan indis di DIY, maka penulisan ini hanya membicarakan bangunan Indis di Kotamadya Yogyakarta.

Pada akhir-akhir ini keberadaan bangunan Indis di Yogyakarta sudah memprihatinkan, karena sebagai tinggalan tersebut mulai hilang. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus, tidaklah mustahil apabila bangunan ini akan musnah. Akibatnya kita akan kehilangan jejak –jejak budaya material orang-orang Eropa di Indonesia dan nilai kejuangan para pahlawan menghadapi penjajah.

Jejak-jejak budaya material merupakan peninggalan sejarah dan

purbakala. Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 alinea 4, tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak, atau tidak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-siasanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (Lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (Lima tahun) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat suatu pengertian bahwa tidak semua bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Untuk disebut sebagai benda cagar budaya harus ada penetapan hukum yang menyatakan sebagai benda cagar budaya., demikian pula untuk situs (harus ada penetapan hukum lebih dahulu)

Pada kesempatan ini, penekanan pada masalah keberadaan bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta. Hal ini karena bangunan Indis merupakan bangunan yang telah berumur 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

II. Sejarah Bangunan-Bangunan Indis di Yogyakarta

Perkembangan kota Yogyakarta tidak akan terlepas dari peranan Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa pertama kasultanan Yogyakarta (Adulrrahman, 1998). Setelah terjadi perjanjian Giyanti pada tahun 1755 M, Mataram dibagi menjadi dua yaitu Ngayogyakarta dan surakarta. Hal ini terjadi karena rekasa Belanda yang ingin memecah belah kerajaan mataram.

Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I menentukan desa Pacetokan di hutan Baringan sebagai pusat pemerintahan (Sasangko 1992). DESA Pacetokan ini berkembang menjadi sebuah kota setelah berbagai bangunan didirikan. Kota tersebut disusun berdasarkan konsep kota kuna islam dengan istana sebagai pusat pemerintahan, dengan masjid, Alun-Alun dan pasar serta pemukiman penduduk sebagai

pelengkapannya. Selanjutnya kota ini dinamai Kota Ngayogyakarta Hadiningrat dengan struktur kota berdasarkan garis poros imajiner Gunung Merapi – Tugu-Kraton Panggung Krapyak- lautan selatan (Laporan Draft Final, 1995).

Untuk melindungi kepentingan VOC Belanda dengan pengawasan Kasultanan Ngayogyakarta yang terletak di sebelah barat Benteng Vrederburg. Pada waktu lalu bangunan ini dikenal dengan nama Lodji Kebon sedangkan saat ini, tinggalan tersebut dikenal dengan nama Gedung Agung. Selain itu semakin banyak orang-orang Eropa yang bermukim dikota ini, maka dibangunlah rumah-rumah orang Eropa. Pemukiman ini terletak disebelah timur benteng Vrederburg yang dikenal dengan lodji kecil. Pemukiman ini berkembang sampai dengan wilayah Bintaran (sebelah timur kali code). (Suharjo Atmo Suprobo). Lihat lamp. I

Bangunan-Bangunan Belanda di kota Yogyakarta berkembang banyak bangsawan yang menyewakan tanah lungguh (apanage) kepada orang-orang Eropa. Hal ini menyebabkan banyak orang, Eropa membangun bangunan bercorak Indis di Yogyakarta. Bangunan yang didirikan berupa fasilitas-fasilitas umum dan pemukiman.

Fasilitas-fasilitas yang didirikan antara lain berupa tempat peribadatan, stasiun kereta api, tempat berkumpul, asrama tentara, sekolahan, pabrik dan lainnya. Secara umum lokasi fasilitas umum ini berada disekitar benteng Vredebung dan berada di sumbu Tugu-Kraton.

Fasilitas umum yang sangat menunjang perkembangan transportasi bagi orang-orang Eropa yaitu pembangunan jalur-jalur kereta api. Pada tahun 1872 dibangun jalur kereta api Yogya-Semarang lewat Surakarta dengan stasiunnya di Lempuyangan. Pengelola jalur ini adalah Nis (Nederland Indische Spoorwegmatchappij). Selain itu berdiri pula SS (Saattsspoorwegen) yang mengelola jalur kereta api Yogya Cilacap pada tahun 1887 dengan stasiunnya berada di Tugu.

Salah satu pemukiman orang-orang Eropa yang telah didirikan yaitu pemukiman Kota Baru. Pemukiman ini terdiri dari rumah-rumah tinggal yang dilengkapi fasilitas-fasilitas umum. Fasilitas umum yang berada di kawasan ini berupa sarana olah raga, sekolahan, gereja dan lainnya. Pola pemukiman ini

tidak berorientasi utara-selatan sehingga merupakan pola pemukiman Eropa (Sumalya, 1993). Lihat lampiran 2.

III. Kelestarian Tinggalan-Tinggalan Indis di Yogyakarta

Kelestarian tinggalan-tinggalan Indis di Yogyakarta adalah Kondisi fisik bangunan Indis yang meliputi bentuk, warna, jenis, ukuran, keadaan, dan pemanfaatan fungsi. Tinggalan-tinggalan Indis di Yogyakarta mempunyai banyak jenisnya. Namun keberadaannya sampai saat ini tinggal beberapa jenis saja karena banyak bangunan-bangunan tersebut tergesur oleh perkembangan kota. Bangunan-bangunan yang tergesur tersebut antara lain pabrik, pertokoan dan rumah-rumah tinggal.

Dari sisa-sisa bangunan yang ada dapat dikelompokkan dari beberapa jenis:

1. Bangunan perkantoran
2. Bangunan militer
3. Bangunan pendidikan
4. Bangunan kesehatan
5. Bangunan pemukiman penduduk
6. Bangunan peribadatan
7. Bangunan pertokoan
8. Bangunan sarana olah raga
9. Bangunan prasarana perhubungan seperti stasiun, jembatan, rel kereta api, dan lainnya.
10. Bangunan fasilitas umum antara lain gedung pertemuan.

Bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta sebagian besar terletak dalam jalur poros Tugu-Kraton. Selain itu, bangunan-bangunan ini berada tersebar mengelompok di beberapa wilayah timur kali code dan sebelah utara Tugu. Kelompok bagian Indis di jalur Tugu Kraton dibatasi oleh kali Code di sebelah timur dan Kali Winongo di sebelah barat. Lihat Lamp. 3

Kelompok bangunan yang berada di Kali Code yaitu kelompok bangunan di kawasan Bintaran (Kec. Mergansan), Kawasan Kota Baru (Kec.

Gondokusuman) dan beberapa lainnya diwilayah Kecamatan Pakualaman. Kelompok bangunan yang berada disebelah utara Tugu yaitu bangunan-bangunan Indis di Kecamatan Jetis.

Sebagian besar kondisi tinggalan-tinggalan Indis di Yogyakarta masih baik . Hal ini terjadi karena sebagian bangunan-bangunan tersebut merupakan *Living Monument*, yaitu bangunan sewaktu ditemukan masih difungsikan seperti fungsi semula. Bangunan-bangunan biasanya merupakan bangunan umum seperti gereja, stasiun, sekolahan dan lainnya. Namun ada beberapa bangunan yang kondisinya sangat memprihatinkan (buruk), karena pemakainya tidak mampu membiayai pemeliharaan.

Secara umum kondisi bangunan Indis di Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu sangat Baik, Baik, Cukup dan Buruk. Kriteria kondisi ini didasarkan kepada usaha pemeliharaan bangunan. Kondisis sebagian bangunan –bangunan Indis di Yogyakarta dapat dilihat dalam lamp. 4.

Tinggalan-tinggalan bercorak Indis di Yogyakarta mempunyai nilai penting bagi perkembangan kota ini. Nilai penting yang dimaksud yaitu nilai Sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nilai sejarah dari fakta-fakta atau peristiwa peristiwa yang terjadi pada bangunan tersebut. Selain itu, bangunan Indis dapat memberikan Ilmu pengetahuan kepada kita. Dilihat dari sudut kebudayaan, tinggalan ini merupakan hasil, cipta, rasa dan karsa yang memberi warna bagi Arsitektur Yogyakarta.

Hak Kepemilikan bangunan-bangunan di kota Yogyakarta dapat menjadi dua yaitu milik pemerintah dan perorangan. Bangunan Indis milik pemerintah yaitu bekas Bangunan Indis yang dimiliki/ dikuasai pemerintah. Sedangkan Bangunan Indis milik perorangan yaitu bangunan yang dimiliki bangunan yang dimiliki/ dikuasi oleh yayasan swasta, lembaga swasta maupun perorangan.

IV. Pelestarian bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta

Pelestarian bangunan-bangunan Indis adalah upaya untuk mempertahankan wujud fisik bangun yang meliputi bentuk, warna, jenis, ukuran, keadaan dan pemanfaatan fungsi agar tetap dipertahankan seperti

keadaan semula, pelestarian bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta akan diuraikan sebagai berikut:

A. Landasan Hukum

Landasan hukum pelestarian tinggalan-tinggalan bercorak Indis di Yogyakarta berdasarkan pada:

1. Landasan Idiel yaitu Pancasila sila ketiga, penjabarannya dalam TAP II/MPR/1978, butir ketiga yang berbunyi pengembangan cinta kepada tanah air dan bangsa melalui cinta kepada benda cagar budaya sebagai warisan bangsa.
2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, pasal 32.
3. Landasan perundang-undangan, yaitu
 - a. Undang-Undang RI no. 4/1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup.
 - b. Undang-Undang RI No. 12/ 1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan
 - c. Undang-Undang RI No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya
 - d. Undang-Undang RI No. 24/ 1992 tentang Penataan Ruang
 - e. Undang-Undang RI No. 1990 tentang Pariwisata
4. Peraturan Pemerintah
 - a. PP. No. 10/1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5/1992
 - b. PP. No.5/1993 tentang AMDAL
 - c. PP. No. 19/ 1995 tentang Penyimpanaan BCB dalam Museum
5. Keputusan Presiden No. 32/1993 tentang Penataan Ruang
6. Keputusan Mendikud
 - a. Kep. Mendikbud No. 0222/e/1980 tentang Tugas, wewenang dan fungsi Dikjenbud
 - b. Kep. Mendikbud No. 0224/u/1981, Tentang penetapan Benteng Vredeburg sebagai peninggalan sejarah.
 - c. Kep. Mendikbud No. 0871/u/1993 Tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya .

- d. Kep. Mendikbud No. 062/u/1995 Tentang pemilikan, penguasaan, pengalihan dan penghapusan Benda Cagar Budaya atau Situs.
 - e. Kep. Mendikbud No. 063/u/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
 - f. Kep. Mendikbud No. 064/u/1995 Tentang penelitian dan penetapan Benda Cagar Budaya atau situs.
7. Keputusan daerah
- a. Instruksi Gubernur No. 1/INSTR/1984
 - b. Keputusan Gubernur Kepala DIY No. 326/KPTS/1995
 - c. Keputusan Wali Kotamadya Yogyakarta No. 72/KD/1984
 - d. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 6/1994

B. Pelaksanaan pelestarian

Pelaksanaan pelestarian peninggalan Indis di Yogyakarta yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendataan/ Pendokumentasian

Kegiatan pendataan pendokumentasian tinggalan bercorak Indis telah dilakukan beberapa kali. Instansi yang melaksanakan adalah SPSP DIY dan Balai Jarahnitra Yogyakarta. Jenis kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

 1. Laporan Bangunan-Bangunan bersejarah di Kodya Yogyakarta, Balai Jarahnitra, tahun 1983.
 2. Laporan pendataan gedung bersejarah, proyek pelestarian/ pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala DIY tahun 1988.
 3. Laporan pendokumentasian Bangunan bersejarah di Kotamadya Yogyakarta SPSP DIY tahun 1991.
 4. Observasi gedung-gedung bersejarah dikawasan Kota Baru, SPSP DIY tahun 1992.
 5. Pendataan Gedung Bekas Kantor Dinas Pasar Kodya Yogyakarta, SPSP DIY 1993.

6. Pendokumentasian Bangunan bersejarah di Kodya Yogyakarta SPSP DIY 1994.
7. Pendataan Gedung-Gedung bersejarah di Yogyakarta SPSP 1986.

Adapun bangunan-bangunan yang telah didata didokumentasi dapat lihat dalam lamp. 4.

b. Pendaftaran

Pendaftaran Bangunan-Bangunan Indis di Yogyakarta telah dilaksanakan oleh SPSP DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 1994/1995 dan tahun anggaran 1996/1997. Tujuan pendaftaran ini untuk memperoleh penetapan hukum bagi tinggalan sejarah yang didata.

Bangunan-Bangunan Indis yang telah didaftarkan sebanyak 16 buah. Rinciannya sebagai berikut.

No	Nama Obyek	No. Pendataran
1	Mus. AD	008/TB/I.13.1/J95
2	Gedung Agung	012/TB/I.13.1/J96
3	SMP N 2 Yogyakarta	013/TB/I.13.1/J96
4	Yayasan Pangudi Luhur	019/TB/I.13.1/J96
5	RRI	026/TB/I.13.1/J96
6	Rumah Tinggal di Jl. IDN Oka	027/TB/I.13.1/J96
7	Rumah Tinggal di Jl. FM. Noto 8	028/TB/I.13.1/J96
8	SMP N 5 Yogyakarta	029/TB/I.13.1/J96
9	SMUN 3 Yogyakarta	030/TB/I.13.1/J96
10	Rumah tinggal Di Jl. Suroto 11	031/TB/I.13.1/J96
11	Asrama Kompi AD	032/TB/I.13.1/J96
12	RS. Mata Dr. Yap	033/TB/I.13.1/J96
13	RS. Bethesda	034/TB/I.13.1/J96
14	Rumah Tinggal Sunaryo 6	035/TB/I.13.1/J96
15	Gereja Kota Baru	036/TB/I.13.1/J96
16	SMU BOPKRI	037/TB/I.13.1/J96

c. Penetapan Hukum

Berdasarkan status hukum tinggalan bangunan-bangunan Indis di Kodya Yogyakarta di katagorikan menjadi 3 yaitu ;

1. Bangunan Indis yang telah ditetapkan sebagai Banda Cagar budaya
2. Bangunan Indis yang Belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya
3. Bangunan Indis yang tidak termasuk katagori benda cagar budaya.

Bangunan Indis yang telah mendapatkan penetapan hukum sebagai peninggalan sejarah sebanyak 4 buah. Keempat bangunan tersebut adalah Benteng Vredeburg, kantor Taxi Centris, Kantor Kelurahan Kricak, dan dan Rumah tinggal Suliantoro Sullaiman. Penetapan Hukum Benteng Vrederburg dilakukan oleh Mendikbud dengan penetapan 0224/u/1981. Sedangkan penetapan bangunan lainnya, ditetapkan oleh walikotamadya Yogyakarta dengan keputusan 72/KD/1984.

d. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan meliputi kegiatan perawatan dan pemugaran. Kegiatan ini antara lain dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan Banteng Vrederburg. Kegiatan ini bertujuan melestarikan bangunan tersebut dan memanfaatkannya sebagai museum.

C. Rencana Pelestarian

Perencanaan Pelestarian bangunan-bangunan Indis harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Hal ini berkaitan dengan perkembangan Kota Yogyakarta yang semakin lama, semakin pesat. Perkembangan Kota yang makin pesat ini ditunjukkan dengan pembangunan fisik yang memerlukan lahan cukup luas. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian-bangunan-bangunan Indis.

Seperti diketahui bahwa bangunan-bangunan Indis merupakan bangunan yang diduga sebagai benda cagar budaya. Bangunan ini bersifat sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Karena sifatnya, maka reproduksi baru bangunan ini sebagai pengganti bangunan lama tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, maka pelestarian bangunan Indis harus dilaksanakan. Langkah-langkah pelestarian bangunan Indis yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: perlindungan hukum, penetapan situs, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan Indis.

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi bangunan Indis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perlindungan ini yaitu agar bangunan tersebut terhindar dari kerusakan akibat ulah manusia.

Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi Indis di Yogyakarta perlu dilakukan tindakan hukum yang meliputi kegiatan pendataan/pendaftaran, penilaian dalam rangka penetapan hukum sebagai benda cagar budaya dan atau situs.

Pelindungan hukum ini berlaku untuk seluruh peninggalan sejarah dan purbakala baik yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau diduga sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya. Pelanggaran atas ketentuan hukum akan berakibat berkurangnya nilai arkeologis maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun konsekuensi arkeologi dan yuridis jika terjadi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang benda cagar budaya dan situs sebagai berikut:

1. Bangunan Indis yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya

a. Konsekuensi arkeologi

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan tentang benda cagar budaya dan situs, misalnya merusak benda cagar budaya, mengubah bentuk, ukuran, warna serta memugar benda cagar budaya tanpa izin terlebih dahulu, maka akan berakibat berkurangnya atau

hilangnya nilai arkeologis benda cagar budaya.

b. Konsekwensi Yuridis

Setiap kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan tentang benda cagar budaya dan situs, misalnya merusak benda cagar budaya, merubah bentuk, ukuran, warna serta memugar benda cagar budaya tanpa izin terlebih dahulu, maka akan berakibat dikenal sangsi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1992.

2. Bangunan Indis yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya

Konsekuensi arkeologis dan yuridis bangunan Indis yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya sama dengan bangunan Indis yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Hal ini mengingat bangunan Indis yang belum ditetapkan sebagai benda cagar budaya adalah termasuk dalam katagori benda yang diduga benda cagar budaya. Upaya perlindungannya sama dengan atau diberlakukan sama dengan upaya perlindungan bangunan Indis sebagai benda cagar budaya.

3. Bangunan Indis yang tidak termasuk benda cagar budaya

Konsekuensi yuridis atas bangunan Indis tidak termasuk benda cagar budaya adalah tergantung kepada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

2. Permintakatan/ Zonasi

Pemintakatan bangunan-bangunan Indis serta situsnya merupakan bagian intergral dari usaha pelestarian bangunan itu. Pemintakatan ini bertujuan untuk menjamin kelestarian situs dan mengkomodasi kepentingan pemanfaatan dengan menetapkan mintakan inti, mintakat penyangga dan mintakat pengembangan.

Penentuan batas-batas mintakan didasarkan dengan cara menarik garis abriter. Penentuan garis ini didasarkan pada garis asli, batas geotopografis maupun batas kelayakan pandang, Pemintakatan

bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta dapat dilihat dalam lamp. 5. Usaha pemintakan ini perlu ditindaklanjuti dengan penetapan situs dan lingkungannya oleh Mendikbud. Penetapan ini harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan-bangunan Indis merupakan upaya melestarikan bangunan tersebut dari kerusakan dari faktor kerusakan manusia, alam dan hayati. Kegiatan pemeliharaan yang harus dilakukan yaitu perawatan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menjaga kebersihan bangunan guna mencegah pelapukan
- b. Melakukan perbaikan atas kerusakan kecil

Kegiatan pemugaran dapat dilakukan dengan cara restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, konsolidasi dan konservasi. Dalam kegiatan pemugaran ini harus memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yaitu keaslian bentuk, bahan, pengerjaan tataletak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta yang perlu dilakukan pemeliharaan dapat dilihat dalam lampiran . 4

4. Pemanfaatan

Bangunan-bangunan Indis di Yogyakarta dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian bangunan tersebut. Hal ini telah diatur dalam pasal 19-23 UU No.5 tahun 1992, pasal 36-40 PP. No. 10 Tahun 1993 dan pasal 10-11 Kepmendikbud No. 062/U/1995. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas bangunan Indis di Yogyakarta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bangunan Indis di Yogyakarta berkembang hampir bersamaan dengan perkembangan kota Yogyakarta.
2. Bangunan Indis memberikan sumbangan ciri khas wajah arsitektur wajah arsitektur kota Yogyakarta
3. Kota Yogyakarta mempunyai berbagai jenis bangunan Indis yang keberadaannya makin berkurang akibat kerusakan dan pemusnahan.
4. Beberapa bangunan Indis merupakan benda cagar budaya yang keberadaannya perlu dilestarikan.

B. Saran

1. Segera mendata/ Mendokumentasi bangunan-bangunan Indis di kota Yogyakarta.
2. Mendaftar Bangunan Indis sebagai benda cagar budaya untuk memperoleh penetapan sebagai benda cagar budaya guna menjamin pelestariannya.
3. Penetapan situs-situs tinggalan-tinggalan Indis dan tata cara pelestariannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman surjomiharjo, 1983 “ Kota Yogyakarta 1880-1930, Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Sosial, diss. UGM.
- Anonim, Rencana Umum tata Ruang kota, Kotamadya Yogyakarta, PEMDA TK II Kodya Yogyakarta, 1994
- Anonim, Laporan Draf Final Penyusunan Model pengatirral Kawasan budaya 1995, jurusan Teknik Arsetiktur , UGM.
- Ari Setyastuti, Laporan Pendataan gedung Bekas Kantor Dinas Pasar kodya Yogyakarta, Suaka PSP DIY, 1993.

- Eko Hadiyanto, laporan Observasi Gedung-Gedung bersejarah di kawasan Kota Baru Kodya Yogyakarta, Suaka PSP DIY, DIY, 1993
- Haary Tri Satyo wahyu, Laporan Pendokumentasian Bangunan Bersejarah di Kodya Yogyakarta, Suaka PSP DIY, 1994
- Hatmo Suprobo Harjo, Kota Yogyakarta dan Benteng Vrederburg, rencana Pelestarian dan pengembangan Benteng Vrederburg
- Yuni Sasongko, "Pemukiman Cina di Ketandan Yogyakarta, Abad XVIII-XIX (Kajian terhadap aspek Ekonomi, Sosial dan keamanan), Skripsi UGM, 1992.
- Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1993.
- Sri Sugiarti, laporan Pendataa Bangunan Bersejarah di kotamadya yogyakarta, Suaka PSP DIY, 1991
- Suherman, Laporan Pendataan Gedung Bersejarah, suaka PSP DIY, 1988
- Suratmin, Bangunan-Bangunan Bersejarah di Kodya Yogyakarta, Balai Jarahnitra, 1993
- Wahyu Indrasana, Laporan pendataan Gedung-Gedung bersejarah, Suaka PSP DIY, 1996.

HASIL SENI BANGUN BERGAYA INDIS

Studi kasus: Kelestarian Sejumlah Benteng di Jawa Tengah

(*Novida Abbas*)

I. PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan

Berbagai hasil seni bangun bergaya Indis cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Bangunan-bangunan tersebut sampai kepada kita dalam berbagai bentuk, yang dapat dibedakan atas bangunan-bangunan yang penggunaannya bersifat pribadi dan bersifat umum (Soekiman 1996: 156). Yang pribadi terutama adalah Bangunan-bangunan rumah tinggal dan pesanggrahan/tempat peristirahatan. Sementara yang pengunanya bersifat umum (public) meliputi bangunan perkantoran, sekolahan, Gereja Komplek Pemakaman, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu terdapat pula bangunan-bangunan yang pergunanya khusus untuk kepentingan militer, Misalnya tangsi dan benteng.

Perkembangan dari motivasi ekonomi menjadi ekspansi politik yang dilancarkan oleh bangsa-bangsa barat pada abad-abad lampau itu mengakibatkan serangkaian perlawanan rakyat di berbagai daerah (Tjandrasmita, 1984 : 45-46). Untuk menggulangi perlawanan rakyat itu, baik Portugis, Belanda maupun Inggris mendirikan sejumlah bangunan pertahanan di berbagai tempat. Sebagai contoh pendirian Benteng Zeelandia dan Deerstede di Ambon untuk menanggulangi perlawanan Thomas Matuleesi (Soetjipto, 1975 : 126-140), Juga pendirian Benteng Vredeburg di Yogyakarta pada tahun 1759 untuk mengawasi aktivitas kraton Yogyakarta (Hammosuprobo, 1979: 150-153). Di samping itu, meletusnya perang Diponegoro di Jawa Tengah pada abad XIX mengakibatkan Belanda melancarkan sistem benteng (Benteng Stesel) sejak tahun 1827 (Hooyer, 1896 :99).

Di beberapa daerah di Jawa Tengah bekas benteng-benteng Belanda (dan portugis) masih dapat disaksikan hingga kini dalam jumlah yang cukup

banyak dengan bentuk maupun keletakan yang beragam. Benteng-benteng tersebut merupakan salah satu jenis tinggalan arkeologis pada masa kolonial Belanda di Indonesia yang mempunyai keterkaitan serta dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan selain itu dengan mengacu pada UU RI No. 5.1992 ketahui bahwa Benteng-benteng tersebut juga merupakan salah satu Benda Cagar Budaya (BCB). Meskipun termasuk dalam kategori BCB, namun pada kenyataan pada sebagian besar benteng di Jawa Tengah tersebut belum diperlakukan sebagai BCB karena berbagai sebab.

Dalam Makalah ini akan dipaparkan mengenai keberadaan dan kondisi fisik sejumlah benteng di Jawa tengah. Penyajian ini didasarkan atas fakta yang dijumpai dilapangan sebagai realisasi dari penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam tahun 1993-1996 (Abba,1993/1994; 1994/1995; 1996/1997).

1.2 Maksud dan Tujuan.

Kajian tentang aspek kelestarian Benteng-benteng dari masa Kolonial Belanda ini dilandasi dengan tujuan untuk menginformasikan kondisi sejumlah benteng tersebut di saat ini. Selain itu juga akan disinggung mengenai potensi yang terkandung di dalamnya. Melalui penyajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran langkah yang sebaiknya dilakukan dalam mengupayakan pelestarian maupun (nantinya) pemanfaatan yang mungkin dapat diterapkan pada benteng-benteng tersebut.

II. KEBERADAAN DAN KONDISI BENTENG “INDIS” DI JAWA TENGAH

Bekas Benteng yang menjadi obyek bahasan berjumlah 10 buah, yaitu masing-masing terdapat di Jepara, Surakarta, Ambarawa, Ungaran, Cilacap, Pekalongan, Gombong dan Salatiga. Sembilan diantaranya merupakan Benteng bekas Belanda, sedangkan 1 merupakan bekas benteng Portugis (?). Sejumlah benteng diketahui dengan pasti masa pendiriannya, sementara beberapa diantaranya belum diketahui dengan pasti masa pendiriannya. Benteng-benteng yang diketahui data pertanggalannya berasal abab XVII-XIX.

2.1. Jepara

Di wilayah Kabupaten Jepara terdapat dua benteng, yaitu bekas Benteng Belanda di desa ujung batu, Kecamatan Jepara dan sebuah bekas benteng Portugis (?) di Desa Bannyumanis kecamatan Keling. Benteng belanda tersebut berasal dari abad XVII (Olthof, 1941 : 165 dan Graff, 1987: 94-95) dan Memiliki denah segi tiga (abbas, 1994),. Semantara benteng portugis (?) belum diketahui nama pendirinya dan berdenah trapesium. Bekas benteng Belanda maupun benteng Portugis tersebut saat ini telah tidak digunakan lagi. Terakhir benteng Belanda terletak di puncak bukit di tepi Laut Jawa itu digunakan oleh TNI Ad dan saat ini dibiarkan terbengkelai. Dinding keliling Benteng beserta bastionnya sebgaiian besar telah runtuh. Sementara itu bekas benteng portugis telah dimanfaatkan oleh pihak pariwisata setempat, yaitu sebagai obyek wisata, mengingat keletakannya di puncak bukit di tepi laut yang cukup menunjang pemanfaatannya sebagai obyek wisata. Sejumlah sarana penunjang telah telah dibangun dibagian dalam benteng, misalnya saja fondasi bekas salah satu bastion digunakan untuk mendirikan semacam gazebo permanen, sementara di bagian lain di dalam benteng juga telah dipasang sarana bermain anak-anak. Sebenarnya di bagian dalam benteng ini masih terdapat sejumlah fondasi bangunan, dan saat ini fondasi-fondasi tersebut telah ditutup oleh beberapa bangunan tersebut di atas.

2.2 Surakarta

Di Surakarta terdapat sebuah bekas benteng Belanda di kaliurang Kampung baru, Kecamatan Pasar kliwon yaitu Benteng Vastenbung, yang didirikan pada sekitar abab XVIII, pada masa pemerintahan Pakubuwono II (1726-1749). Benteng yang terletak di sebelah timur laut Kraton Surakarta ini berdenah segi empat. Terakhir benteng ini digunakan sebagai markas dan asrama Brigif 6, dan sekarang berada di bawah pengelolaan PT Pondok Solo permai (suara Merdeka, 1994). Bekas benteng ini sekarang hanya tersisa tembok kelilingnya saja, sementara bangunan-bangunan di bagian dalam benteng telah dirubuhkan. Menurut keterangan pihak pengelola saat ini, bekas ini direncanakan akan digunakan sebagai hotel dengan tidak menghilangkan

tembok keliling tersebut (bangunan hotel akan didirikan di bagian dalam tembok keliling).

2.3. Ambarawa

Sebuah bekas benteng Belanda, yaitu Benteng Williem I, terdapat di kelurahan Ambarawa, kecamatan Ambarawa (kota). Benteng ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Benteng pendem, karena sebagian bangunannya sengaja dibuat tersembunyi di bawah tanah. Benteng yang berasal dari abad XIX ini secara keseluruhan utama benteng ini berlantai dua. Saat ini kompleks benteng tersebut digunakan sebagai rumah tahanan militer di bawah Kodam IV Diponegoro. Dari keseluruhan bangunan yang ada di kompleks ini hanya sebagian kecil yang digunakan sebagai kantor, ruang tahanan, dan tempat tinggal karyawan. Sebagian besar bangunan dibiarkan kosong sementara beberapa bagian lainnya ditutup dengan semen (permanen) untuk sarabng burung walet, terutama bangunan-bangunan yang dulunya merupakan gudang amunisi dan menara penjagaan. Bagian bangunan lainnya yang tidak digunakan saat ini mulai rusak dan runtuh, misalnya saja lorong di lantai dua, atap, dan bangunan sel bawah tanah.

2.4. Ungaran

Di Desa Ungaran, kecamatan ungaran terdapat sebuah benteng Belanda, yaitu Willem II. Benteng seluas 0,2 Ha ini terletak di tepi jalan raya yang menghubungkan Semarang dengan Ambarawa dan berdenah bujur sangkar. Benteng yang berasal dari abad XVIII. Ini sebagai tempat tinggal dengan sendirinya telah terjadi perubahan pada bangunan benteng ini, baik berupa penambahan maupun pengurangan.

2.5. Cilacap

Di Cilacap terdapat dua bekas Benteng Belanda, yaitu benteng Pemdem terletak di kelurahan Cilacap, Kecamatan selatan, dan Benteng Karangbolong yang teletak di pulau Nusa Kambangan, tepat di kalurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap selatan. Benteng pedem yang dirikan pada abad XIX ini

pada awalnya berdenah segi lima dan terletak di arel seluas 10 ha, namun saat ini yang tersisa hanya 6,5 ha. Saat ini benteng pemdem telah dimanfaatkan sebagai obyek Pariwisata setempat. Bekas areal benteng yang 3,5 ha tersebut telah menjadi milik Pertamina dan ditempat itu telah didirikan sejumlah bangunan perkantoran maupun tangki-tangki penyimpanan minyak. Selain itu dalam upaya pengelolaannya, Dinas pariwisata secara bertahap juga masih melakukan pengusapan terhadap bagian-bagian benteng yang masih terpendam dalam usaha menampakan sebuah elemen Benteng. Sementara itu Benteng Karangbolong yang terletak ditepi timur laut. Pulau Nusakambangan belum diketahui denah aslinya, hanya diketahui bahwa benteng ini berlantai empat (dihitung dari lantai bawah tanahnya). Masa pendirian benteng ini juga belum diketahui. Benteng tersebut saat ini dalam keadaan terbenakelai dan tertutup cukup rapat oleh vegetasi yang tumbuh di sekitarnya. Benteng yang sebagian bangunannya juga dibuat terpedam didalam tanah keadaannya cukup memperhatikan, karena lantai-lantai kayu maupun lantai-lantai bata di beberapa bagian benteng telah diambil, padahal sebenarnya fisik benteng secara keseluruhan masih relatif utuh.

2.6. Pekalongan

Sebuah bekas benteng Belanda berdenah jajaran genjang terletak di wilayah Kalurahan panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara. Benteng yang tidak diketahui tahun pendiriannya ini aslinya dibagian dalamnya memiliki sejumlah bangunan berupa barak prajurit, runag tahanan, dan sociteeit. Bekas benteng tersebut saat ini digunakan sebagai rumah tahanan Negara. Dalam fungsinya sebagai rumah tahanan negara tersebut bangunan benteng ini telah mengalami perubahan-perubahan, misalnya saja pembongkaran dua dari tiga bastion untuk dijadikan menara pengawasan serta penambahan bangunan-bangunan baru di dalam maupun di luar tembok keliling.

2.7. Gombong

Di wilayah desa Sidayu, Kecamatan Gombong, terdapat sebuah bekas benteng Belanda yang berdenah segi delapan dan berlantai dua. Masa

penderian benteng ini belum diketahui. Dulunya benteng ini digunakan sebagai tempat pendidikan dan latihan serdadu belanda sekaligus sebagai tempat perbekalan (logistik). Di kompleks ini juga terdapat bangunan-bangunan lain yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal para serdadu maupun bangunan perkantoran. Seluruh kompleks ini digunakan untuk Secatam (Sekolah Calon tamtama) Rindam IV di bawah kodam IV/Diponegoro. Khusus untuk bangunan utama benteng yang berlantai dua yang telah disebut diatas digunakan untuk tempat tinggal para anggota secatam yang saat ini hanya dihuni oleh lima keluarga. Kondisi benteng berlantai dua ini relatif utuh, meskipun beberapa bagian bangunannya ada yang rusak, mengingat sebagian besar tidak dihuni lagi.

2.8. Salatiga

Di pinggir kota Salatiga, yaitu pertigaan jalan utama yang merupakan jalur senmaranga Salatiga-Boyolali terdapat sebuah bekas benteng belanda. Secara keseluruhan bekas benteng ini berdenah empat persegi panjang. Dulunya kompleks di kelilingi tembok, yang sekarang sebagian besar telah runtuh. Di bagian dalam terdapat sejumlah bangunan, yang antara lain terdiri sejumlah loji, ruang tahanan, kamar bola dan gudang mesiu. Benteng yang didirikan pada abad XIX ini dulu digunakan sebagai tangsi sekaligus untuk melatih pemuda milik pasukan kavaleri Belanda. Saat ini bekas benteng tersebut digunakan sebagai gudang beras dan sekaligus asrama brigade infantri 4111 kostrad dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya dengan sebutan "Tebek" (Tempat Perbekalan). Bekas benteng ini dapat dikatakan relatif utuh, hanya beberapa bangunan saja telah runtuh, misalnya tembok keliling, selain itu juga terdapat penambahan sejumlah bangunan baru.

Selain benteng-benteng yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula sebuah bekas benteng di Boyolali, yaitu Benteng Renovatum (Humas Dati II kabupaten Boyolali, tanpa tahun), yang saat ini hanya tersisa sebagian taludnya dan tiang benderanya saja. Bneteng ini telah diruntuhkan seluruhnya pada tahun 1953 dan saat ini areal bekas benteng tersebut digunakan sebagai lokasi taman bermain, wartel, gedung arca, dan berbagai sarana olahraga.

III. PEMBAHASAN

Membicarakan keberadaan sejumlah benteng di berbagai tempat khususnya di Jawa Tengah secara umum bahwa tampak kelestariannya cukup memprihatinkan dan belum sepenuhnya mendapat perhatian yang selayaknya. Terlihat dari beberapa benteng yang letaknya di tengah kota cenderung terlenda oleh berbagai kepentingan pembangunan, misalnya benteng Vastenburg di surakarta dan Benteng Renovatum di Boyolali. Sementara itu Benteng-benteng lain meskipun belum hilang sama sekali, kondisinya sangat memprihatinkan dan terancam dalam bentuk lain, seperti pemanfaatan untuk sarang walet, penambahan dan atau pengurangan bangunan, maupun dibiarkan terbengkelai.

Memang belum pernah dilakukan analisa terhadap potensi sumberdaya arkeologi yang berupa bekas benteng-benteng tersebut di atas. Kecuali (mungkin) Benteng pedem di Cilacap mengingat benteng tersebut saat ini telah dimanfaatkan dan benteng Willem II di Ungaran (Darmosoetopo, 1983). Meskipun demikian, secara garis besar akan dicoba untuk menjabarkan nilai penting benteng-benteng tersebut sebagai suatu sumberdaya arkeologi. Setidak tidaknya benteng-benteng tersebut memiliki nilai penting kesejarahan, ilmu pengetahuan, dan sosial ekonomi. Aspek kesejarahan adalah sejauh mana sumberdaya arkeologi itu dilatarbelakangi oleh (mungkin) Benteng pedem di Cilacap mengingat benteng tersebut saat ini telah dimanfaatkan dan benteng Willem II di Ungaran (Darmosoetopo, 1983). Meskipun demikian, secara garis besar akan dicoba untuk menjabarkan nilai penting benteng-benteng tersebut sebagai suatu sumberdaya arkeologi. Setidak tidaknya benteng-benteng tersebut memiliki nilai penting kesejarahan, ilmu pengetahuan, dan sosial ekonomi. Aspek kesejarahan adalah sejauh mana sumberdaya arkeologi itu dilatarbelakangi oleh peristiwa bersejarah yang dianggap penting serta yang berkaitan secara simbolis dengan peristiwa terdahulu. Aspek ilmu pengetahuan adalah sejauh mana sumberdaya arkeologi memiliki deposit mutu serta keluasaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya aspek sosial ekonomi adalah sejauh mana peran penting sumberdaya arkeologi tersebut bagi aspek-aspek nilai dan maupun nilai komersial sumberdaya arkeologi tersebut dalam meningkatkan pendapatan ekonomis bagi suatu tempat, misalnya peristiwa. Dua aspek penting di atas mengacu pada ketentuan pasal

1 UURI No.5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, sementara nilai penting terakhir mengacu pada analisis nilai penting yang pada umumnya dilakukan pada manajemen sumberdaya arkeologi/budaya (Schiffer & Gummerman, 1977: 241-248).

Dari segi kesejarahan, benteng-benteng tersebut di atas memiliki nilai historis yang cukup tinggi, mengingat keberadaan benteng-benteng tersebut merupakan bukti adanya perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Sementara itu dari segi ilmu pengetahuan, keberadaan benteng-benteng itu juga memiliki kualitas tersendiri, misalnya di bidang arsitektur, khususnya mengenai bangunan-bangunan pertahanan. Di bidang sosial ekonomi tinggalan berupa benteng dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran tentang sejarah kebudayaan dan sejarah arsitektur, di samping itu pula dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya.

Meskipun cukup penting untuk dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, maupun pada kenyataan hingga saat ini kondisi bangunan bergaya Indis yang berupa benteng-benteng tersebut cukup memprihatinkan. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari pihak ABRI, meskipun penggunaannya relatif rendah, dalam arti dari keseluruhan kompleks suatu benteng hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan, sementara sebagian besar lainnya dibiarkan terbengkelai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang sedikit banyak "merusak" fisik benteng itu sendiri. Beberapa benteng yang sudah tidak digunakan lagi oleh ABRI (benteng VOC di Jepara dan benteng Karangbolong di Pulau Nusakambangan) hanya dibiarkan terbengkelai, sehingga lambat laun menjadi semakin rusak, baik karena alam maupun manusia. Sementara itu terdapat benteng-benteng yang sudah mulai dimanfaatkan untuk obyek wisata (Benteng Pendem di Cilacap dan Benteng Portugis di Jepara). Namun pemanfaatannya belum sepenuhnya mengacu pada kaidah pemanfaatan yang berlaku. Tidak berarti bahwa upaya-upaya penanggulangan belum dilakukan, tetapi hal itu cukup sulit untuk dilakukan mengingat status kepemilikan benteng-benteng tersebut. Karena status kepemilikannya masih di tangan ABRI (sebagian besar), maka banyak hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan.

IV. PENUTUP

Melihat kenyataan bahwa masih banyak benteng yang masih berdiri hingga saat ini meskipun dalam kondisi yang tidak terlalu baik, diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya untuk mencegah semakin turunnya kualitas sumber daya arkeologi tersebut, meskipun terdapat kendala-kendala dalam upaya pelaksanaannya. Untuk mencegah turunnya kualitas sumberdaya arkeologi yang berupa bekas-bekas benteng utamanya di Jawa Tengah dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut : Sebagai langkah awal tentunya perlu ditingkatkan inventarisasi maupun penelitian yang cukup lengkap dan menyeluruh terhadap tinggalan-tinggalan tersebut. Selanjutnya langkah ini diikuti pula dengan penerbitan SK BCB sebagai “pengikat” bagi para pengguna ataupun pengelola bangunan-bangunan tersebut. Namun demikian, mengingat sebagian besar benteng tersebut masih dibawah pengelolaan ABRI, belum diketahui apakah diperlukan kebijaksanaan khusus di tingkat yang lebih tinggi dalam menangani kasus-kasus benteng ini. Selanjutnya kelestarian benteng-benteng ini juga tergantung pada realisasi UU RI No. 4/1982 dan PP 10.1993 pasal 44 dalam perencanaan pengembangan suatu kota/wilayah (RUTRK dan RDTRK). Dalam kasus-kasus yang terjadi di beberapa kota (misalnya Surakarta dan Boyolali). terlihat bahwa berbagai perundangan tersebut belum diperhitungkan. Khusus untuk kasus yang terjadi di Boyolali , hal itu dapat dimengerti , karena peruntuhan benteng Renovatum tersebut dilakukan pada tahun 1953, jauh sebelum berbagai perundangan beserta PP dan Kepmen yang berkaitan itu diundangkan. Akan tetapi apa yang terjadi dengan benteng Vastenburg di Surakarta seyoganya dapat dicegah apabila undang-undang beserta ketentuan berikutnya tersebut benar-benar dipahami dan direalisasikan sepenuhnya dalam perencanaan pengembangan kota. Dalam hal ini masalahnya adalah bahwa sejauh ini belum banyak dilakukan penelitian maupun inventarisasi atas berbagai bangunan bergaya Indis. Selain itu informasi hasil penelitian arkeologi maupun inventarisasi BCB (Khususnya yang menyangkut bangunan Indis) Belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan lintas sektoral di wilayah dan juga masih kurangnya pemahaman UU RI No.5/1992 dan segala ketentuan ikutannya oleh para teknokrat perencana dan pengambil keputusan di jajaran tingkat I dan II.

Pada hal potensi dan nilai penting BCB sebagai aset pembangunan baik dalam skala nasional, provेशनal, maupun lokal harus diperhitungkan dan dipertimbangkan sepenuhnya dalam pembangunan wilayah, khususnya yang tertuang dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RDTR) di tingkat I dan II, bahkan dalam Rencana umum Tata Bangunan (RUTB) dan rencana Detil Tata Bangunan (RDTB) di tingkat I dan kecamatan.

ACUAN

Abbas, Novida. 1993/1994. **Laporan Hasil penelitian Arkeologi Survei Arsitektur Benteng Kolonial di Grobogan, Salatiga, Boyolali, dan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (Tahap I)** Balai Arkeologi Yogyakarta.

_____. 1994/1995. **Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Survei Sarana Pertahanan Kolonial Kotamadya Pekalongan, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah (Tahap II)**. Balai Arkeologi Yogyakarta.

_____. 1994 /1995 . **Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Survei Sarana Pertahanan Kolonial Di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Pronvinsi Jawa Tengah (Tahap II)** Balai Arkeologi Yogyakarta

_____. 1996/1997. Penempatan Benteng Kolonial Di kota-kota abab XVII-XIX di Jawa Tengah , dalam **Jurnal Penelitian Arkeologi** Balai Arkeologi Yogyakarta, pp. 47-52.

Darmosoetopo, Riboet, dkk. 1983. Studi Kelayakan Benteng Willem II Ungaran . Yogyakarta ; Proyek Pemugaran dan pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah.

Graaf, H.J de . 1987. Runtuhnya Istana Mataram . Jakarta : P.T. Pustaka Utama Grafiti.

- Hatmosuprobo, Suharjo. 1979. Kota Yogyakarta dan Benteng Vredenburg Yogyakarta : Temu Peneliti Vredenburg, Lembaga studi Pedesaan dan kawasan dari Universitas Gadjah Mada.
- Hooyer, G.B. 1896. De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch van 1811 tot 1894, I Den
- Humas Kabupaten Dati II Boyolali tanpa tahun . Sejarah Singkat Hari Jadi Kabupaten Boyolali tidak diterbitkan
- Olthof, W. L 1941. Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit saking Nabi Adam Doemoegi ing taon 1647. S- Gravenhage : M Nijhoff.
- Schiffer, Michael B. & George J. Gummerman. 1977 . Conservation Archaeology, A guide for Cultural Resources Management Studies. New York : Academic Press.
- Soekiman, Djoko .1996 Kebudayaan Indis dan gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa
(Abad X VIII sampai medio Abad XX). Disertasi. Universitas Gadjah Mada.
- Soetjipto, F. A (ed) . 1975. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: P. T Grafitas.
- Suara Merdeka . Sekitar Bangunan Kuno di Solo . 1&2 November 1994.
- Tjandrasmita, Uka (ed). 1984. Sejarah Nasional Indonesia III. : PN Balai Pustaka.

KELESTARIAN DAN PELESTARIAN BANGUNAN INDIS DI JAWA TENGAH

(Gunadi dan Tri Hatmaji)

I. PENDAHULUAN

Bangunan dan kawasan bersejarah merupakan salah satu elemen yang dapat menterjemahkan sejarah proses pembentukan dan perkembangan suatu wilayah atau kota dari generasi ke generasi sehingga apabila terjadi kerusakan ataupun kepunahan elemen tersebut maka akan hilang pula jejak masa lampau suatu kawasan atau kota tersebut. Salah satu contoh bangunan ataupun kawasan bersejarah adalah bangunan dan kawasan yang muncul pada masa kolonial. Sesuai dengan tema seminar tentang “Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Indis”, maka terlebih dahulu perlu kita sepakati tentang pengertian bangunan Indis. Bangunan Indis ialah semula merupakan sebutan untuk bentuk bangunan rumah tempat tinggal pejabat pemerintah Hindia Belanda yang memiliki ciri-ciri perpaduan antara bentuk bangunan Belanda dan rumah tradisional, oleh Berlage disebut dengan istilah *Indo Europeesche Bouwkunst*, van de Wall menyebutnya dengan istilah *Indische Huizen*, dan Pramono Atmadi menyebutnya dengan arsitektur Indis (Soekiman, 1996: 6-7). Kata “Indis” berasal dari bahasa Belanda *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda, yaitu nama daerah jajahan Belanda di seberang lautan yang secara geografis meliputi jajahan di kepulauan yang disebut *Nederlandsch Oost Indie*. Lebih jauh dikatakan oleh Djoko Soekiman bahwa “gaya Indis” adalah untuk menyebut gaya seni yang muncul pada abad XVIII di Hindia Belanda, gaya seni tersebut lahir, timbul, dan berkembang serta dicipta oleh kelompok masyarakat di kepulauan Nusantara sebagai wilayah koloni Belanda (Soekiman, 1996: 9). Oleh karena pada era kolonial tersebut selain dari Eropa, pengaruh budaya luar mulai menguat baik dari daratan Cina, Indis, dan Arab. Maka apabila dapat disetujui kami mengusulkan bahwa yang dimaksud dengan bangunan Indis dalam makalah ini tidak terbatas pada bangunan tinggalan masa kolonial Belanda, tetapi termasuk pula bangunan-bangunan lain yang sejaman dan mempunyai konteks sejarah dengan bangunan Indis, baik yang datang dari Cina, Indis, Arab seperti disebut di atas.

Undang-undang Nomor : 5. Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 1 a, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Berdasarkan defenisi atau pengertian benda cagar budaya di atas maka, bangunan Indis yang berupa bangunan tunggal (single building) maupun dalam kawasan yang berkelompok, dapat diklasifikasikan sebagai benda cagar budaya.

Mengingat bahwa bangunan Indis adalah objek benda cagar budaya yang dilindungi Undang-undang, maka sebagai langkah awal dalam upaya pelestariannya, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propensi Jawa Tengah memulai dengan kegiatan pendaf:aran dan pendokumentasian bangunan-bangunan Indis di Kotamadya Surakarta, Tegal, Pekalongan dan Kotamadya Semarang. Berdasarkan hasil kegiatan pendokumentasian di atas diketahui bahwa saat ini bangunan-bangunan tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, sehingga telah beralih fungsi, misalnya beberapa bangunan yang digunakan untuk perkantoran ataupun tempat tinggal, sebagian yang lain masih berfungsi seperti semula, antara lain seperti stasiun kereta api, gereja, rumah tinggal, dan penjara.

II. BANGUNAN INDIS DI JAWA TENGAH

Daerah-daerah di pantai Utara pulau Jawa seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, dan Rembang pada abad XVII merupakan tempat berlabuh orang-orang Eropa. Bahkan jauh sebelum itu bangsa lain seperti para pedagang yang datang dari Gujarat dan Cina telah mendahului datang ke Jawa. Selanjutnya bangsa-bangsa asing tersebut mengembangkan pengaruhnya ke daerah pedalaman. Selain mendirikan bangunan-bangunan yang bercirikan budaya yang dibawanya, mereka juga mempengaruhi arsitektur tradisional seperti yang terlihat pada Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta serta Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta.

Pada awal masa pemerintahan kolonial, perletakan bangunan semata-mata hanya berdasarkan pertimbangan ekonomis seperti ditemukan di “Kota Lama” Semarang, kompleks-kompleks “Pecinan”, dan Kampung Arab. Setelah kolonial Belanda bertindak sebagai penjajah, maka perkantoran maupun rumah pejabat disesuaikan dengan strategis politis dan keamanan. Bangunan-bangunan yang muncul saat itu ada yang di bangun secara berkelompok (berupa kawasan bangunan Indis) maupun bangunan tunggal, biasanya bangunan tunggal berupa sarana seperti gereja, mesjid, asrama militer, stasiun, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan bangunan Indis dalam Makalah ini mengacu pada pengertian kawasan arkeologi yang mencakup tiga dimensi yaitu dimensi bentuk, ruang dan waktu yang ketiganya berada dalam satu konteks dan merupakan unit dasar dalam formulasi unit Arkeologis yang harus dikombinasikan untuk sampai pada tujuan studi arkeologi (Timbul Haryono, 1995:139). Sedang yang dimaksud dengan bangunan tunggal (single building) adalah bangunan yang berdiri sendiri dan dalam skala mikro tidak secara langsung berada dalam satu konteks dengan bangunan-bangunan lain.

Beberapa obyek benda cagar budaya yang berupa bangunan Indis yang dapat kami paparkan dalam kesempatan ini antara lain bangunan-bangunan yang ada di Kotamadya Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surakarta. Berdasarkan hasil inventarisasi di kotamadya Tegal, diketahui ada 12 (Dua Belas) unit bangunan Indis dan tersebar di 4 (empat) wilayah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, 2 unit di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, 5 unit di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, dan 1 unit di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur. Sebagian besar bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan tunggal, sedang yang berupa satuan kelompok adalah stasiun kereta api dan beberapa rumah dinas karyawan PJKA yang terletak disekitar stasiun tersebut. Beberapa bangunan tunggal saat ini telah beralih fungsi seperti digunakan sebagai rumah dinas Walikota, Gedung, DPRD, Universitas Pancasila, dan Kantor Pengadilan Negeri. Beberapa bangunan yang masih berfungsi seperti fungsi semula antara lain Penjara, Klenteng, Pasar, Bak Air, dan disimpulkan sementara bahwa bangunan tersebut semata-mata untuk keperluan kelancaran perekonomian.

Peninggalan bangunan Indis di Kotamadya Pekalongan hampir sama dengan yang ditemukan di Kodya Tegal, baik jenis dan jumlahnya. Dari hasil pencatatan yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah ada 11 unit yang terdiri dari mesjid, kantor, penjara, stasiun kereta api, dan rumah tinggal. Sebagai besar merupakan bangunan tunggal, sedang bangunan yang berkelompok ialah bangunan yang terdapat di kompleks “Pecinan” yang terletak di jalan Blimbing. Kodya Pekalongan.

Semarang sebagai pusat kota pelabuhan sejak awal telah menjadi perhatian orang-orang asing sehingga di Kotamadya Semarang sekurang-kurangnya terdapat 55 unit bangunan Indis yang dibangun antara tahun 1600 an -1900 an dengan jenis yang lebih banyak dibanding dengan ke dua kotamadya sebelumnya. Yang menarik perhatian dari bangunan Indis di kotamadya Semarang ini ialah bangunan Indis yang terkonsentrasi di “Kota Lama” yang merupakan satu kawasan yang oleh Pemerintah Daerah dikatakan sebagai kawasan inti. Bahkan oleh Direktorat Bina Teknik. Drektorat Jenderal Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan PT. Wiswakharmandi lokasi antara stasiun Tawang-Gereja Bleduk dan sekitarnya telah dilakukan studi guna penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Semarang. Adapun tujuan utamanya ialah revitalisasi kawasan udaya kota lama Semarang. Selain bangunan-bangunan yang terletak di kawasan kota lama Semarang, ada pula bangunan-bangunan tunggal seperti Lawang Sewu, Gedung APDN, gedung DPRD, Rumah Sakit, beberapa rumah tinggal yang terletak di “atas” (disekitar Candi Baru) dan bangunan-bangunan lain yang tidak akan diuraikan semuanya.

Selain Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran, yang termasuk dalam katagori bangunan Indis di Kodya Surakarta cukup banyak dan bervariasi yang sedikitnya ada 35 unit bangunan dari 10 jenis yaitu bangunan militer, loji luar dan dalam, pasar, perkantoran, tempat ibadah, sekolahan, stasiun, rumah sakit, museum, dan gedung pertemuan.

Bangunan Indis baik yang berkelompok dalam satu kawasan maupun bangunan tunggal (single building) adalah bagian dari benda cagar budaya yang mempunyai fungsi sebagai bukti sejarah, sumber sejarah, obyek ilmu

pengetahuan, cermin sejarah, media pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa, media untuk memupuk kepribadian bangsa dibidang kebudayaan dan ketahann nasional, obyek wisata budaya (Uka Tjandrasasmita 1982: 4-5). Lebih ditegaskan lagi oleh Timothy Darvill dalam Malcolm A. Cooper dan kawan-kawan dalam buku *Managing Archaeology*, bahwa benda cagar budaya mempunyai hubungan dengan beberapa faktor kepentingan lain seperti :

Scientific research, maksudnya benda cagar budaya tidak hanya milik para ahli arkeologi atau sejarah berbagai disiplin dapat memanfaatkan obyek tersebut demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Creative arts, bahwa benda cagar budaya dapat pula dijadikan sumber inspirasi ataupun obyek para seniman, sastrawan, penulis maupun fotografer.

Education, benda cagar budaya terutama yang berupa monumen atau benda tak bergerak, merupakan obyek yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi anak-anak dan remaja khususnya untuk menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsanya yang selanjutnya akan menimbulkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah airnya.

Recreation and tourism, benda cagar budaya dapat dijadikan obyek wisata budaya dan tempat-tempat rekreasi yang sehat dan positif.

Symbolic representation, benda cagar budaya dapat dijadikan sebagai gambaran simbolis bagi kehidupan manusia.

Legitimation of action, maksudnya suatu saat hasil penelitian benda cagar budaya yang berupa suatu proposisi, kadang-kadang proposisi tersebut terkait dengan suatu kebijakan-kebijakan yang bermotivasi atau bermuatan politis yang dapat melegitimasi suatu tujuan atau kondisi tertentu.

Social solidarity and integration, keberadaan benda cagar budaya dapat mewujudkan solidaritas sosial dan integrasi dalam masyarakat. Misalnya benda cagar budaya yang dikeramatkan dan dijadikan sebagai “perwujudan cikal bakal” bagi sekelompok masyarakat, maka seluruh anggota masyarakat akan merasa mempunyai ikatan batin dengan obyek tersebut.

Monetary and economic gain, keberadaan obyek benda cagar budaya di suatu daerah akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan-kegiatan penjualan seperti penjualan buku informasi tentang benda cagar budaya, menjual souvenir, makanan dan minuman kepada para pengunjung obyek, menjadi pemandu wisata, dan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang (Darvill, 195:40-5).

Atas dasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa benda cagar budaya adalah bagian dari suatu jaringan konteks informasi. Sehingga dalam pengolahan benda cagar budaya tersebut akan saling bertemu dengan berbagai faktor kepentingan lain. Oleh karena itu agar tidak saling berbenturan, maka perlu dicari solusi yang hasilnya akan “menguntungkan” berbagai pihak yang terkait.

Bangunan Indis dan lingkungannya kiranya layak untuk mendapatkan perlakuan sebagai benda cagar budaya, khususnya yang dapat digolongkan dalam pasal 1 UU No. 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya, yaitu penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Tetapi pernyataan di atas belum cukup dapat ,memberikan perlindungan terhadap kelestarian bangunan Indis. Bangunan Indis pada umumnya berada di kota bahkan tidak jarang merupakan cikal-bakal suatu kota. Dalam perkembangan kota selalu menuntut perubahan baik dalam struktur, fungsi maupun perwajahannya. Hal ini sebenarnya wajar tetapi dengan adanya pesan pelestarian tersebut mengakibatkan timbulnya benturan-benturan yang harus dicarikan titik temunya. Sebagai contoh permasalahan dapat dipaparkan pada kesempatan ini ialah sebab-sebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan di Kotamadia Semarang antara lain;

Untuk mengatasi kepadatan lalu lintas pemerintah berupaya melebarkan badan jalan, tetapi di pihak lain akan terjadi penggusuran bangunan-bangunan bersejarah, seperti penggusuran rumah tradisional Cina yang terjadi di sepanjang jalan Sedagaran, Semarang.

Selain kegiatan fisik seperti tersebut di atas, terancamnya kelestarian benda cagar budaya bahkan didukung dengan perangkat hukum pula, misalnya Peraturan Daerah tentang Rencana Untuk Tata Ruang Kota yang mengorbankan Gedung Central yang terletak di jalan Pemuda, Semarang akan

dibongkar dan didirikan Bank.

Pemanfaatan bangunan Indis dengan merubah fungsi semula, akan terjadi perubahan dan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna tersebut.

Belum adanya bukti bahwa suatu bangunan Indis tersebut telah dicagar budayakan. Tidak adanya perhatian atau perawatan, sehingga benda cagar budaya terkesan ditelantarkan.

Ruislag bangunan bersejarah milik pemerintah yang dilakukan oleh swasta.

III. UPAYA PELESTARIAN BANGUNAN INDIS DI JAWA TENGAH

Tujuan ideal dalam upaya pelestarian benda cagar budaya seperti tertuang dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya disebutkan bahwa : Upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh jati-diri bangsa yang berdasarkan Pancasila, serta untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Demikian pula dalam pasal 2 UU No. 5. Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya disebutkan : Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional (Anonim, 1995). Kedua pernyataan di atas merupakan cerminan dari pasal 32 UUD' 45 yang antara lain disebutkan bahwa : Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat-derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Anonim, tt, terbit:24).

Walaupun demikian kami yang merupakan bagian dari Institusi pengemban Undang-Undang R.I. No.: 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Direktorat Jenderal Kebudayaan), selain harus mengemban amanah

Undang-Undang di atas, tetapi dituntut pula untuk dapat bekerja sama dengan institusi lain yang terkait dengan kepentingan yang sama. Adapun untuk Daerah Jawa Tengah telah diterbitkan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menyatakan bahwa “ dalam melaksanakan rehabilitasi dan perluasan bangunan-bangunan yang mempunyai nilai historis monumental di wilayah/daerah, hendaknya berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang Unit Pelaksana Teknisnya di daerah adalah Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Jawa Tengah.

Diskusi kali ini yang khusus mengkaji tentang salah satu benda cagar budaya yang berupa bangunan-bangunan Indis, dalam pengelolaan bangunan tersebut kami Tim pemrasaran dari Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Jawa Tengah mencoba mengajukan beberapa saran, mudah-mudahan sumbang saran ini bukan menjadi saran yang sumbang, tetapi dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya pengelola benda cagar budaya terutama bangunan Indis di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya , adapun sumbang saran kami adalah sebagai berikut :

Pertama, perlu dilakukan koordinasi yang kuat dan tajam antar lembaga yang terkait, maupun dengan para pemilik atau pemangku bangunan Indis tersebut. Apabila bangunan-bangunan Indis dianggap sebagai monumen hidup, maka para pemangku dan pemilik dianggap sebagai pewaris dari budaya masa lalu yang dapat memberikan informasi dan penjelasan tentang latar sejarah dari bangunan yang dikuasainya. Dengan melibatkan peran serta para pemilik ataupun pemangku bangunan Indis tersebut, maka efek sosiologis yang akan muncul dalam kaitannya dengan pengelolaan benda cagar budaya itu akan dapat dipikirkan pula. Seperti dikatakan oleh Nick G. Dharmaputra bahwa selama ini para arkeolog merasa yang paling berhak “meggali masa lalu atas nama negara”, sehingga masyarakat pemilik yang masih hidup sering tidak masuk dalam perhitungan (Dharmaputra, 1995:8).

Kedua, dalam upaya melestarikan bangunan Indis perlu dilakukan penilaian dari masing-masing lembaga yang terkait dengan mencari formulasi sistim penilaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun dasar pembobotan tersebut mengacu pada pasal 1 UU No. 5. Tahun 1992 yang

meliputi : umur fisik bangunan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, jenis langka, terbatas dan istimewa, mewakili gaya bentuk fisik yang khas, mempunyai nilai sejarah dan ilmu pengetahuan, penting dan berguna di masa lampau serta bermanfaat pada masa kini. Dengan melakukan pembobotan tersebut, maka diharapkan akan didapatkan rambu-rambu dalam pengelolaan bangunan Indis.

Ketiga, dalam kaitannya dengan pemanfaatan bangunan Indis selain dapat dimanfaatkan sebagai fungsinya sekarang seperti untuk kantor dan tempat tinggal tetapi perlu diperhatikan pula bagaimana obyek tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata.

Keempat, perlu dipikirkan juga hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, terutama biaya perawatan dalam upaya pelestarian benda cagar budaya, walaupun dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 5. Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya serta dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah mengatur tentang perlindungan dan pemeliharaan, menurut hemat kami masih perlu dipikirkan tentang kemungkinan adanya partnership (investor) ataupun sponsorship.

IV. PENUTUP

Melihat kompleknya permasalahan dan saratnya beban pemerintah dalam upaya pelestarian bangunan Indis, kiranya perlu dipikirkan adanya sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelestarian. Oleh karena itu dalam unsur perencanaan di daerah perlu adanya ahli sejarah dan arkeologi, sehingga tidak ada pengertian bahwa pembangunan ekonomi lebih penting dari pada pelestarian benda cagar budaya. Seperti ditegaskan dalam pasal 27 UU R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, bahwa dalam penataan ruang harus memperhatikan pertimbangan dari Departemen, Lembaga, dan badan-badan pemerintah lainnya serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. Almarhum Bapak Soepardjo Roestam sewaktu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah

pernah mengatakan bahwa bangunan yang mempunyai nilai historis monumental dapat dijadikan bukti adanya khasanah kebinekaan tata arsitektur dan merupakan simbol jati-diri Jawa Tengah. Pemerintah Daerah Tingkat II yang telah melaksanakan koordinasi seperti tersebut di atas adalah Pemerintah Daerah TK II, yang telah melaksanakan koordinasi seperti tersebut di atas adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Semarang dan Surakarta.

Setelah dapat melestarikan bangunan Indis yang ada, tentunya perlu perencanaan kemungkinan munculnya bangunan-bangunan baru. Untuk mengantisipasi masalah tersebut perlu adanya peraturan atau rambu-rambu seperti : jarak bangunan dari jalan utama maupun dengan bangunan terdekat, ketinggian, proporsi fasade, bentuk pintu dan jendela, material, warna, dan lain-lain (kondisi exterior). Apabila mungkin kondisi interiornya dapat dipertahanan akan lebih baik lagi, karena tata ruang atau organisasi ruang dalam suatu bangunan akan mencerminkan budaya atau perilaku manusia yang menghuninya. Dengan adanya keserasian antara bangunan baru dengan elemen bangunan lama yang khas, maka akan diperoleh suatu karakteristik suatu daerah atau kawasan tersebut. Disamping itu perlu dipikirkan pula tentang biaya pemeliharaan bagi bangunan Indis yang kurang mendapatkan perhatian karena terbatasnya kemampuan dari pemilik atau pemakai. Biaya tersebut dapat pula dibebankan kepada para pemilik bangunan baru yang didirikan di kawasan bangunan Indis, dengan menaikan pajak , biaya IMB dan sebagainya yang dapat diatur dalam Peraturan Deaerah, bagi pemilik atau pengguna bangunan Indis yang tidak mampu melakukan perawatan dengan baik dapat diberikan keringanan atau dibebaskan pajaknya sehingga dapat digunakan untuk biaya perawatan bangunan tersebut.

Apabila hal tersebut di atas dapat dilaksanakan, maka beban Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (salah satu institusi pemegang amanat UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya) yang sering menjadi tudingan apabila terjadi ketidakrawatan bangunan kuno atau benda cagar budaya akan semakin berkurang. Selanjutnya untuk mendapatkan suatu pegangan yang baku dalam pengelolaan bangunan Indis perlu adanya petunjuk teknis atau peraturan daerah sebagai penjabaran UU RI No. 5 ahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya yang meliputi : Acuan teknis dalam perlindungan dan pemeliharaan bangunan Indis sebagai benda cagar budaya.

Penjelasan tentang kemungkinan pengembangan fungsi, yaitu fungsi lindung, fungsi budidaya, dan fungsi cagar budaya bangunan Indis, baik untuk tujuan ekonomis, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan.

Sistem penataan dan pemanfaatan yang berkualitas, yaitu adanya keseimbangan dari beberapa faktor kepentingan yang terkait, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan tetap dapat mengaktualisasikan nilai yang memiliki sejarah panjang sebagai kota atau kawasan.

Sebagai penutup perlu kami tegaskan bahwa apa yang telah diuraikan di atas telah sesuai pula dengan isi Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 mengenai masalah kebudayaan yang menyatakan bahwa : Perencanaan ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah (GBHN, 1993:192).

Daftar Bacaan

- Anonim, Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993, Penerbit CV. Mini Jaya Abadi.
- Anonim, Undang-Undang Dasar 1945 Dengan penjelasannya Beserta Susunan Kabinet Pembangunan Pembangunan VI dan Butir-Butir Pancasila, tanpa tahun terbit, Penerbit APOLLO, Surabaya
- Anonim, 1995, Undang-Undang No. 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 10. Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonim, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Semarang, Bagian Proyek Penataan Bangunan. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum. Tahun Anggaran 1994-1995.

- Brooks, Graham, 196, "Developing An Historic Hiritage Site : A Report On Goat In Sydney Australia", International Conference On Tourism And Heritage Management, Yogyakarta (unpublished)
- Darvill, Timothy, 1995, "Value System In Archeology" dalam Managing Archaeology, editedd by Malcolm A. Cooper DKK, Routledge, TJ Press Ltd, New York, USA.
- Dharmaputra, Nick G. "Kebudayaan Hidup dan Arkeologi", Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi, Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Haryono, Timbul, 1995, "Arkeologi Kawasan dan Kawasan Arkeologis: Asas Keseimbangan Dalam Pemanfaatan", Berkala Arkeologi-edisi Khusus, Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Laporan pemotretan bangunan Peninggalan Sejarah di Kodya Pekalongan, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Jawa Tengah, 1992 (Belum diterbitkan)
- Laporan Pemotretan Bangunan Peninggalan Sejarah di Kodia Tegal, Suakan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provensi Jawa Tengah, 1991 (Belum diterbitkan)
- Laporan Inventarisasi Peninggalan Sejarah di Wilayah Daerah Tingkat II Kotamadia Semarang, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propensi Jawa Tengah, 1983 (Belum diterbitkan)
- Laporan Inventarisasi Bangunan Kuno Bersejarah di Kotamadya Dati II Surakarta, Lembaga Pengabdian Masyarakat UNS Sebelas Maret, Surakarta Tahun 1994-1995.
- Sumijati dan Iajati, 1996. Kawasan Kota Baru : "Alternatif Pengembangan Obyek Pariwisata di Yogyakarta", Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora III, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Uka Tjandrasmita, 1982, Usaha-Usaha Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Dalam Pembangunan Nasional,

Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

—————, 1995, “Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Hubungannya Dengan Arkeologi”, dalam Seminar Nasional tentang Metodologi Riset Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, (Belum diterbitkan).

Perpustakaan
Jenderal

0

ISBN 979-96216-4-X